

**LAPORAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2023**



HARI JADI

**Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat Jalan Singkarsa No. 17 Kandangan PO box 71212,
Telpon (0517) 21066 Faxes. (0517) 21022**



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Kinerja Dinas PUTR Tahun 2023 dapat disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2023 yang merupakan tahun ke-5 pelaksanaan Renstra DPUTR Tahun 2018-2023.

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini disajikan atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas PUTR Tahun 2023, Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Disadari dalam penyusunannya masih banyak kelemahan. semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat untuk peningkatan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk masa mendatang.

Kandangan, 8 Maret 2024

Kepala Dinas,



TEDY SOETEDJO, S.T., M.T
Pembina Utama Muda
NIP. 19730117 199803 1 009

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan yang Dihadapi	4
1.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	5
1.4 Landasan Hukum.....	6
1.5 Sistematikan Penulisan	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
2.1 Rencana Strategis	9
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	13
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Akuntabilitas Kinerja	16
3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023	19
3.3 Analisis Capaian Kinerja per Sasaran Strategis	21
3.4 Perbandingan Capaian Realisasi IKU Renstra Dinas PUTR Tahun 2019-2023.....	66
3.5 Realisasi Capaian Realisasi IKU Dinas PUTR dengan Capaian Realisasi Tingkat Nasional	68
3.6 Daftar Prestasi SKPD Tingkat Nasional dan PrAkuntabilitas Keuangan	69
3.7 Analisis Efektifitas dan Efisiensi	90
BAB IV PENUTUP.....	92
4.1 Kesimpulan	92
4.2 Rekomendasi	93

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sasaran Strategis Jangka Menengah Pelayanan SKPD	12
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023	13
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Tahun 2023	14
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	16
Tabel 3.2	Matrik Tindak lanjut Rekomendasi APIP atas Hasil AKIP Tahun 2022	17
Tabel 3.3	Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2023	19
Tabel 3.4	Rekap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2023	20
Tabel 3.5	Hubungan Sasaran, Indikator, Meta Indikator dan Sumber Data Sasaran 1 “Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi”	21
Tabel 3.6	Target dan Realisasi Kinerja “Presentase kinerja sistem jaringan igasi”	22
Tabel 3.7	Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Tahun 2023	24
Tabel 3.8	Target dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Bangunan Publik yang Laik Fungsi	24
Tabel 3.9	Target dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Bangunan Publik yang Laik Fungsi	34
Tabel 3.10	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Program Pengelolaan Sumber Daya Air	35
Tabel 3.11	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Program Penyelenggaraan Jalan dan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	37
Tabel 3.12	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Program Penataan Bangunan Gedung	40
Tabel 3.13	Hubungan Sasaran, Indikator, Meta Indikator dan Sumber Data Sasaran 2 “Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar air minum dan sanitasi yang aman”	41
Tabel 3.14	Target dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	42
Tabel 3.15	Capaian Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Kab.HSS Tahun 2013	43
Tabel 3.16	Jumlah Rumah Tangga Stunting yang Memiliki Akses Air Bersih per Kecamatan sampai dengan Desember 2023	45
Tabel 3.17	Rekapitulasi Desa ODF per Kecamatan Tahun 2022	47
Tabel 3.18	Capaian Pemenuhan Kebutuhan Sanitasi Kab.Hulu Sungai Selatan Tahun 2023	48
Tabel 3.19	Target dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman	50
Tabel 3.20	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Program	52

	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM	
Tabel 3.21	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	54
Tabel 3.22	Hubungan Sasaran, Indikator, Meta Indikator dan Sumber Data Sasaran 3 “Meningkatnya kepatuhan penggunaan tata ruang sesuai dengan peruntukannya”	58
Tabel 3.23	Target dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang	58
Tabel 3.24	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	64
Tabel 3.25	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023	66
Tabel 3.26	Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Tingkat Nasional Tahun 2023	68
Tabel 3.27	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang Secara Langsung Mendukung Ketercapaian Indikator “Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi”	70
Tabel 3.28	Program Kegiatan, Sub Kegiatan pada Program Pengelolaan Pendidikan yang Secara Langsung Mendukung Ketercapaian Indikator “Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar air minum dan sanitasi yang aman”	71
Tabel 3.29	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang Secara Langsung Mendukung Ketercapaian Indikator “Meningkatnya kepatuhan penggunaan tata ruang sesuai dengan peruntukannya”	72
Tabel 3.30	Realisasi anggaran belanja program, pendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi” Dinas PUTR Tahun 2023	87
Tabel 3.31	Realisasi anggaran belanja program, pendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar air minum dan sanitasi yang aman” Dinas PUTR Tahun 2023	88
Tabel 3.32	Realisasi anggaran belanja program, pendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya kepatuhan penggunaan tata ruang sesuai dengan peruntukannya” Dinas PUTR Tahun 2023	89
Tabel 3.33	Efektifitas Kinerja	90
Tabel 3.34	Efisiensi	91

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya sesuai Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah bahwa Dinas PUTR mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- b. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi; Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, Evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi;
- c. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu

Sungai Selatan sebagai perangkat organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari Kepala Dinas/Pejabat Eselon II, kesekretariatan, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi setingkat Eselon III, Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Perbekalan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu. Perangkat sekretariat terdiri dari sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian keuangan dan sub bagian Perencanaan. Disamping itu untuk melaksanakan tugas tertentu dalam membantu tugas Kepala Dinas terdapat beberapa ASN yang menduduki jabatan fungsional tertentu antara lain : Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Penyehatan Lingkungan, Penata Ruang dan Pembina Jasa Konstruksi, untuk jelasnya dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

- 1)** Sekretariat, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pembagian tugas sekretariat dijabarkan dalam 3 sub bagian, yaitu
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
 - b. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program dan rencana kerja serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

- c. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan keuangan.
- 2) Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan peningkatan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
 - 3) Bidang Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengelolaan dan pemeliharaan serta pengembangan sistem drainase kawasan, sarana prasarana air bersih, sarana prasarana air limbah dan infrastruktur permukiman, penyelenggaraan pembangunan dan penataan bangunan gedung serta penataan lingkungannya yang menjadi kewenangan Daerah.
 - 4) Bidang Sumber Daya Air, mempunyai tugas menyelenggarakan peningkatan, pembangunan, rehabilitasi, dan operasional pemeliharaan infrastruktur sumber daya air yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
 - 5) Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi, mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi tata ruang yang menjadi kebijakan Daerah serta menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan terhadap pengembangan jasa konstruksi Daerah.
 - 6) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas, terdiri dari :
 - a. UPTD Peralatan dan Perbekalan, mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional Dinas di bidang pengelolaan peralatan dan perbekalan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - b. UPTD Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional Dinas dibidang Pengelolaan Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu serta

tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Untuk menggambarkan kinerja organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada Tahun 2023 maka disusunlah laporan kinerja ini.

1.2 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan yang Dihadapi

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang. Disamping itu juga melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar bidang air minum dan sanitasi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bagi Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dihadapkan dengan beberapa kendala dalam pemenuhannya, sebagai berikut :

- a. Keterbatasan sumber daya manusia yang profesional di bidang infrastruktur.

- b. Ketersediaan sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas yang belum memadai.
- c. Kondisi alam yang kurang kondusif, sehingga menghambat penyelesaian pelaksanaan pekerjaan
- d. Terjadinya bencana alam yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur yang sudah terbangun.

1.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Isu Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak terlepas dari isu-isu pembangunan nasional maupun pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan tingkat nasional provinsi, rencana tata ruang wilayah dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta memperhatikan dampak dari pandemic covid-19 yang mempengaruhi aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat maka isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Bidang Bina Marga

Belum mantapnya kondisi jaringan jalan kabupaten sebagai prasarana transportasi dalam melayani arus lalu lintas barang dan orang yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pengembangan jaringan jalan untuk membuka daerah dan mempermudah transportasi antar Kecamatan dan Desa.

b. Bidang Sumber Daya Air

Penyediaan air baku belum seimbang dengan kebutuhan air bersih masyarakat. Disamping itu seiring dengan bertambahnya penduduk bertambah pula kebutuhan pangan maka diperlukan peningkatan bahan pangan, maka perlu tersedianya saluran irigasi yang berfungsi baik untuk peningkatan produksi pertanian.

c. Bidang Cipta Karya

Belum optimalnya pelayanan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga perlu pembangunan sarana prasarana air bersih dan sanitasi. Disamping itu juga belum optimalnya pembangunan fasilitas publik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan fasilitas parasana dan sarana dalam rangka peningkatan kualitas manusia berupa fasilitas olahraga yang yang berstandar dan layak dan prasarana publik lainnya.

d. Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi

Belum optimalnya penyelenggaraan tata ruang kabupaten karena belum tersedianya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan sistem pengendalian untuk menjamin pemanfaatan ruang yang transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Disamping itu sebagai Pembina jasa konstruksi belum mampu menyediakan tenaga terampil konstruksi yang cukup dan bersertifikat untuk penyedia pekerjaan konstruksi.

1.4 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencakup:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
- j. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- l. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 ini terdiri atas 4 (empat) Bab sesuai dengan PermenPAN RB Nomor 53 tahun 2014, yaitu:

BAB I Pendahuluan menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II Perencanaan Kinerja menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023

Bab III Akuntabilitas Kinerja menyajikan capaian Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dan Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Rencana Srategis Perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Renstra disusun dengan berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 – 2023 yaitu “Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat”. Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 (lima) Misi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu :

1. Mewujudkan Aksebilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
2. Mewujudkan Daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian.
4. Mengoptimalkan sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.
5. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2018-2023 berkontribusi pada pencapaian pelaksanaan Misi ke satu dan ketiga . Pada misi kesatu Dinas PUTR sesuai kewenangannya ikut serta mewujudkan aksesibilitas pelayanan dasar khususnya aksesibilitas masyarakat terhadap sarana air minum dan sanitasi, maka hal ini menjadi salah satu sasaran strategis Dinas PUTR yaitu meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar air minum dan sanitasi yang aman. Sedangkan pada misi ketiga yaitu meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga hal ini menjadi salah satu sasaran strategis Dinas PUTR yaitu meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya dari sektor konstruksi lingkup kewenangan urusan pekerjaan umum, meliputi bidang bina marga, cipta karya dan sumber daya air. Pembangunan perekonomian biasanya diiringi oleh pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, gedung, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan lain sebagainya. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh daerah baik pemerintah ataupun swasta memberikan andil dalam perekonomian. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan seperti pembangunan drainase, jalan, rumah dinas, gedung kantor, pasar dan lain-lain mempunyai andil besar dalam pertumbuhan pada kategori konstruksi. Selain itu Dinas PUTR juga mempunyai kewenangan urusan menyelenggarakan tata ruang, meliputi penyusunan regulasi tentang rencana tata ruang dan pengendaliannya, maka hal ini menjadi salah satu sasaran strategis yaitu meningkatnya kepatuhan penggunaan tata ruang sesuai dengan peruntukannya.

yaitu terkait pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yaitu akses sarana air bersih layak dan akses sarana sanitasi layak. serta misi ketiga yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur. Pembangunan infrastruktur perannya sangat sentral dalam upaya mendukung keberhasilan pembangunan berbagai sektor di daerah sehingga berbagai sektor unggulan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat memberikan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Disamping itu ketersediaan infrastruktur juga sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Di dalam Renstra Dinas PUTR Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 telah ditetapkan tujuan yaitu Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas. Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata telah ditetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis yang merupakan kondisi riil yang ingin dicapai oleh Dinas PUTR pada akhir periode Renstra tahun 2023. Adapun Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, serta target indikator kinerja dan Sasaran Strategis di tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Realisasi				Target
			2019	2020	2021	2022	2023
1	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi	1. Indeks Konektivitas Jalan	3.581	3.595	3.622	3.635	3,642
		2. Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	61,90%	65,60%	68,49%	70,47%	71,43%
		3. Persentase bangunan gedung yang laik fungsi	23,80%	47,52%	66,66%	85,71%	100%
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar air minum dan sanitasi yang aman	4. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman	81,00%	82,35%	83,64%	85,44%	85,90%
		5. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	77,96%	80,34%	83,13%	87,01%	90,00%
3	Meningkatnya kepatuhan penggunaan tata ruang sesuai dengan peruntukannya	6. Persentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana tata ruang	75%	75%	75%	80%	100%

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka ditetapkan IKU dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan No 7 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022, sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Penanggung Jawab
1	2	3	4	6
1	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi	Indeks Konektivitas Jalan	Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi diperlukan konektivitas pusat-pusat pertumbuhan	Bidang Bina Marga
		Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	Untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pertanian perlu didukung oleh infrastruktur irigasi yang memadai	Bidang Sumber Daya Air
		Persentase bangunan gedung yang laik fungsi	Untuk meningkatkan pelayanan publik perlu bangunan yang berkualitas	Bidang Cipta Karya
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman	Mengimplementasikan PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal	Bidang Cipta Karya

	air minum dan sanitasi yang aman	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	Mengimplementasikan PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal	Bidang Cipta Karya
3	Meningkatnya kepatuhan penggunaan tata ruang sesuai dengan peruntukannya	Persentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana tata ruang	Mengimplementasikan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	Bidang Tata Ruang dan Jaskon

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Adapun kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan, tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET 2022
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi	Indeks Konektivitas Jalan	Persen	3.642
		Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	Persen	71,43%
		Persentase bangunan gedung yang laik fungsi	Persen	100%
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar air minum dan sanitasi yang aman	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman	Persen	85,90%
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	Persen	90,00%
3	Meningkatnya kepatuhan penggunaan tata ruang sesuai dengan peruntukannya	Persentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana tata ruang	Persen	100,00%

Program

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
2. Program Penyelenggaraan Jalan
3. Program Penataan Bangunan Gedung
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Anggaran

Rp 46.550.376.236
Rp 138.877.816.611
Rp 40.475.630.801
Rp 18.292.770.828

5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Rp 15.407.172.000
6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Rp 4.369.844.000
7. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Rp 2.859.135.500
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi Rp 685.364.200
9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Rp. 8.652.335.685

Kandangan, 2 Oktober 2023

Pihak Pertama
Bupati Hulu Sungai Selatan,



Drs. H. Achmad Fikry, MAP

Pihak Kedua
Kepala Dinas PUTR,



Tedy Soetedjo, ST, MT
NIP. 19730130 199803 1 009

BAB III AKUNTABILITAS

Bab III Berisi :

1. Akuntabilitas Kinerja
2. Capaian Kinerja Tahun 2023
3. Capaian Kinerja Per Sasaran Strategis
4. Akuntabilitas Keuangan
5. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran;

3.1 Akuntabilitas Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melaksanakan Pengukuran Kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2023, Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian	Kode
1.	$\leq 91 - 100 \%$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	$76 \% \leq 90 \%$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \% \leq 75 \%$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65 \%$	Rendah	Kuning Muda
4.	$\leq 50 \%$	Sangat Rendah	Merah

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas PUTR Kab. Hulu Sungai Selatan tahun sebelumnya (tahun 2022) telah dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluasi Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku APIP

meliputi aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. dengan beberapa rekomendasi dan tindaklanjut sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Matrik Tindak lanjut Rekomendasi APIP atas Hasil Reviu AKIP
DPUTR Tahun 2022

No	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindaklanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung jawab	Status/Progres Penyelesaian
1	Melanjutkan penyempurnaan penjenjangan kinerja dengan memperhatikan kerangka logis untuk mencapai target kinerja, sehingga hubungan antar level jabatan kinerja dapat sepenuhnya terkait antara satu dengan lainnya.	Membuat Perjanjian Kinerja berjenjang	1 Dok	April 2023	Kasubag Perencanaan	Selesai
2	Melanjutkan penerapan Renja dan Renstra pada setiap tahun berkenaan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk penentuan target.	Membuat Cascading Kinerja	1 Dok	Mei 2023	Kasubag Perencanaan	Selesai
3	Melakukan penyempurnaan pada aplikasi e-SAKIP dengan memasukkan rencana aksi sebagai bahan monitoring dan evaluasi dalam pengukuran kinerja	Membuat Rencana Aksi per triwulan	1 Dok	Mei 2023	Kasubag Perencanaan	Selesai
4	Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan menyajikan informasi mengenai analisis strategi dan tindaklanjut yang akan dilakukan dalam menyempurnakan atau meningkatkan kinerja kedepannya.	Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023	1 Dok	Januari 2024	Sekretaris	Selesai

Terhadap rekomendasi atas hasil evaluasi Tim Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut, telah ditindaklanjuti sebagai berikut :

- a. Penyempurnaan penjenjangan kinerja antar level jabatan telah dilakukan yang digambarkan dalam pohon kinerja dan

diformalkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja pejabat pimpinan tinggi pratama eselon II dengan Bupati, Perjanjian kinerja pejabat administrator eselon III dengan Kepala Dinas PUTR, Perjanjian kinerja pejabat pengawas eselon IV pada Sekretariat dengan Sekretaris, Perjanjian Kinerja pelaksana/Jabatan Fungsional dengan atasan langsung masing-masing.

- b. Penetapan target Kinerja pada tahun berikutnya telah memperhatikan atas realisasi kinerja tahun sebelumnya, sehingga dilakukan koreksi penetapan target kinerja pada sasaran setrategis, program dan kegiatan tahun 2023 dengan memperhatikan realisasi tahun 2022. Hal ini dapat dilihat pada cascading kinerja.
- c. Untuk memudahkan monitoring pengukuran kinerja, maka telah disusun rencana aksi pencapaian target kinerja per triwulan yang diinput dan dapat dimonitor dalam aplikasi e-SAKIP Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada alamat esakip.hulusungaiselatankab.go.id
- d. Laporan kinerja telah disusun dengan menyajikan informasi mengenai analisis strategi dan tindaklanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja kedepan. Hal ini dituangkan dalam kesimpulan dan Rekomendasi di Laporan Kinerja Tahun 2023 ini.

3.2 Capaian Kinerja Tahun 2023

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator Kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta target dan capaian realisasi dirinci sebagai berikut.

Tabel 3.3
Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023
Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi	1. Presentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi	%	68,49	70,47	71,43	71,56
	2. Indeks Konektivitas Jalan	Angka	3.622	3,635	3,642	3,649
	3. Persentase bangunan gedung	%	66,66%	85,71%	100%	100%
Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar air minum dan sanitasi yang aman	4. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman	%	83,64%	85,44%	85,90%	87,44%
	5. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	%	83,13%	87,01%	90,00%	97,77%
Meningkatnya kepatuhan penggunaan tata ruang sesuai dengan peruntukannya	6. Persentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana tata ruang	%	75%	80%	100%	100%

Secara umum Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2018-2023. Semua target IKU berhasil dicapai seperti tampak pada tabel 3.4.

Tab2el 3.4
Rekap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tahun 2023

Uraian	Tercapai IKU	Tidak tercapai IKU
Sasaran 1	3	0
Sasaran 2	2	0
Sasaran 3	1	0

Dinas PUTR mempunyai 3 sasaran strategis dan 6 indikator kinerja utama , pada tahun 2023 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan Renstra 2019-2023 semua target indikator kinerja utama telah tercapai target yang telah ditetapkan. Adapun gambaran skala nilai peringkat kinerja pada capain kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar Capaian Seluruh Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis Dinas PUTR Tahun 2023



Pada sasaran strategis 1 keberhasilannya diukur dengan 3 indikator kinerja utama dan tercapai 3 IKU lebih dari 100% dengan kategori sangat tinggi, sedangkan pada sasaran strategis 3 mempunyai 2 IKU sebagai ukuran keberhasilan dan tercapai lebih dari 100% dengan kategori sangat tinggi. Demikian pula

pada sasaran strategis 3 mempunyai 1 IKU dengan capaian 100 % atau dengan kategori sangat baik.

3.3 Capaian Kinerja per Sasaran Strategis

Adapun Analisis Capaian Kinerja per sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

3.3.1 Sasaran 1 : Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi

Sasaran Kinerja 1 yaitu Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, diukur dengan Indikator Kinerja yaitu indeks konektifitas jalan, persentase kinerja sistem jaringan irigasi dan persentase bangunan gedung yang laik fungsi, dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 3.5

Hubungan Sasaran, Indikator, Meta Indikator dan Sumber Data Sasaran 1 “Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi”

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utara	Meta Indikator	Sumber Data
Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi	1. Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	Jumlah ketersediaan air irigasi (1,2 L perdet/ha) pada setiap musim tanam dibagi jumlah ketersediaan air irigasi seluruh hektar x 100 %	Bidang Sumber Daya Air
	2. Indeks Konektivitas Jalan	Jumlah jaringan jalan dibagi dengan jumlah Desa/Kelurahan	Bidang Bina Marga
	3. Persentase bangunan gedung yang laik fungsi	Jumlah bangunan pelayanan publik yang layak fungsi dibagi jumlah total bangunan pelayanan publik yang terbangun x 100%	Bidang Cipta Karya

Kinerja Indikator sasaran Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 digambarkan sebagai berikut

3.3.1.1 Indikator 1 : Persentase kinerja sistem jaringan irigasi

Capaian Presentase kinerja sistem jaringan irigasi digambarkan pada tabel 3.6 berikut.

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Kinerja “Presentase kinerja sistem jaringan irigasi”

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline (Realisasi Tahun 2021)	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)
Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi	Presentase kinerja sistem jaringan irigasi	Persen	68,49	70,47	71,43	71,65	100,30

Berdasarkan realisasi kinerja pada tabel 3.5 dapat disampaikan bahwa realisasi indikator Presentase Kinerja Sistem Jaringan irigasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2023 berdasarkan Hasil kegiatan EPAKSI sebesar 71,65%. Dengan target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar 71,43%, capaian kinerjanya sebesar 100,30% atau masuk kategori Baik sekali. Seperti yang kita ketahui capaian angka ini dihitung berdasarkan Jumlah ketersediaan air irigasi (1,2 L perdet/ha) pada setiap musim tanam dibagi jumlah ketersediaan air irigasi seluruh hektar x 100 %.

Realisasi kinerja indikator Presentase Kinerja Sistem Jaringan irigasi pada tahun 2023 sebesar 71,65% jika dibandingkan dengan realisasi ketercapaian pada tahun 2022 sebesar 70,47% maka terdapat kenaikan 1,18%. Capaian kinerja tahun 2022 sebesar 101% dan pada tahun 2023 diperoleh 100% sehingga jika dibandingkan terdapat penurunan capaian kinerja sebesar 1 %.

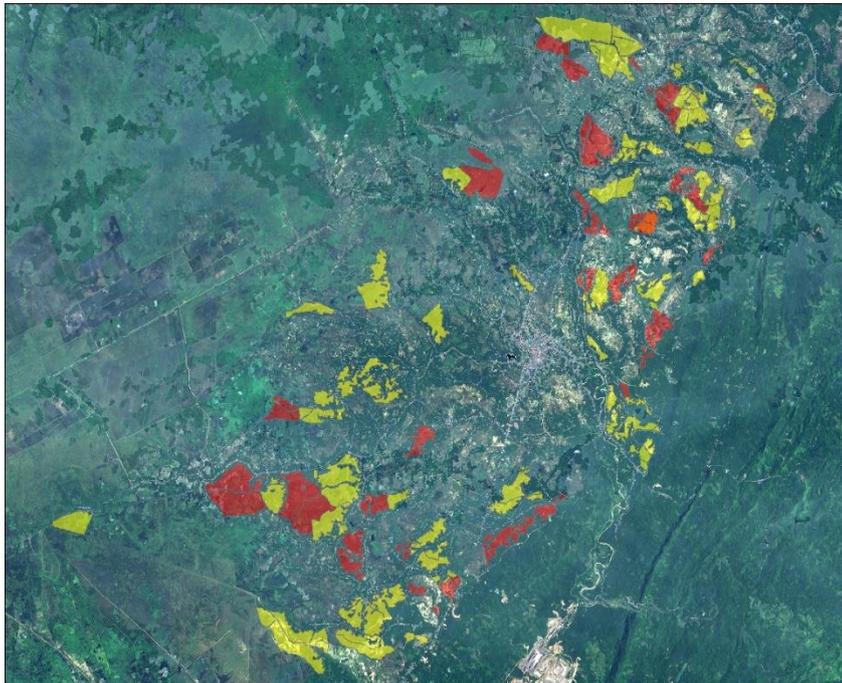
Faktor keberhasilan Sasaran Strategis Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2023 didukung dengan Program Pengelolaan Sumber Daya Air yaitu dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi bangunan utama dan saluran irigasi.

Untuk menghitung realisasi Kinerja Sistem Jaringan Irigasi Bidang Sumber Daya Air setiap tahunnya melaksanakan kegiatan EPAKSI, dimana data yang dihasilkan terkait hasil survei kondisi bangunan irigasi dengan klasifikasi baik, rusak ringan, rusak sedang dan rusak berat. Data tersebut sebagai acuan evaluasi akhir tahun untuk mengetahui hasil pembangunan pada Bidang Sumber Daya Air, serta berfungsi sebagai acuan merencanakan pekerjaan rehabilitasi/pembangunan/peningkatan jaringan irigasi di tahun yang akan datang. Untuk detailnya dapat ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Tahun 2023

No.	Jenis	Tingkat Kerusakan Bangunan (ha)			
		Baik	Ringan	Sedang	Berat
1	Irigasi permukaan	2.538	7.013	2.293	222
2	Irigasi rawa	550	1.260	1.175	755

Adapun luasan kondisi irigasi kewenangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut pada tabel di atas akan tampak lebih jelas perbandingannya dalam fisualisasi dalam gambar peta berikut ini.



Keterangan :
Kondisi Rusak

Kondisi Baik


Gambar Peta Daerah Irigasi Permukaan

Dari gambar peta di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 terdapat 29 Daerah Irigasi permukaan yang kami tangani agar kondisi kondisi bangunan menjadi baik/rusak ringan, antara lain 3 buah Rehabilitasi bendung 14 buah rehabilitasi jaringan irigasi dan 9 buah pembangunan jaringan irigasi serta 3 buah peningkatan jaringan irigasi, dimana terdapat penambahan 177 ha luas fungsional jaringan irigasi dikarenakan adanya pembangunan bendung, Sehingga kondisi bangunan irigasi menjadi lebih baik.

Adapun untuk daerah irigasi rawa ada 1 paket pekerjaan yaitu pada peningkatan Daerah irigasi Rawa Bangkau dengan areal 373 ha dimana terdapat 4 buah pintu air dan 22.401 meter. Dengan demikian ada Daerah irigasi rawa yang mengalami perbaikan kondisi jaringan irigasinya sehingga diharapkan dapat membantu para kelompok P3A atau kelompok tani untuk meningkatkan produktivitas pertanian di sekitar areal Desa Bangkau Kec.Kandangan.



Keterangan :

Kondisi Baik



Kondisi Rusak



Gambar Peta Daerah Irigasi Rawa

Daerah irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga terdapat kewenangan Balai Wilayah Sungai dan Pemerintah Provinsi Kalsel yaitu Daerah Irigasi Amandit dan Daerah Irigasi Telaga Langsung serta DIR Rawa nagara, DIR Tanggul lungau dan DIR Angkinang yang lebih jelasnya dapat dilihat pada peta berikut ini.

Pada tahun 2023 terdapat 20 Daerah irigasi permukaan dan 1 Daerah irigasi Rawa yang telah dilakukan penanganan baik itu pada kegiatan Rehabilitasi, Peningkatan serta Pembangunan jaringan irigasi. Dengan Total realisasi kegiatan sepanjang 28.988 meter baik itu saluran primer, sekunder dan tersier yang merupakan kewenangan kabupaten. Dimana jaringan irigasi yang telah dilakukan Rehabilitasi, pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi terdapat penambahan 1.434 hektar luas jaringan irigasi yang telah mengalami perbaikan kondisi bangunan irigasi menjadi lebih baik. Dari sini dapat disimpulkan sebanyak 86 bangunan daerah irigasi permukaan dalam kondisi baik, dan masih terdapat 38 bangunan Daerah irigasi permukaan dengan

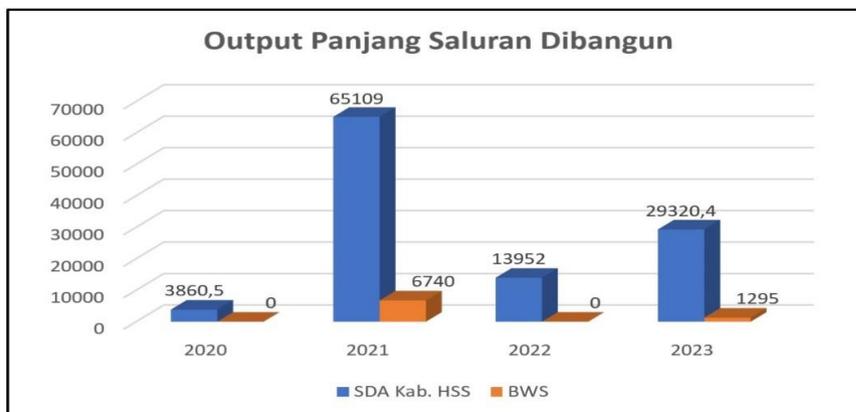
kondisi bangunan Rusak sedang dan berat dari total jumlah 124 bangunan Daerah irigasi permukaan dan rawa kewenangan Kab.HSS. Di sisi lain kondisi baik pada jaringan irigasi permukaan telah mencapai 9.551 hektar dari total luas Daerah irigasi permukaan 12.116 hektar. Sedangkan jumlah kondisi jaringan irigasi baik di daerah irigasi rawa 1.810 hektar dari total Luas Daerah irigasi rawa 3.740 hektar.

Harapannya dengan kondisi jaringan irigasi yang semakin baik dapat meningkatkan Indeks Pertanaman yang terdapat di berbagai kecamatan dan dapat meningkatkan Produktivitas Pertanian Kab.HSS Tahun 2023. Dimana pada tahun ini data dari Dinas Pertanian Kab.HSS telah terealisasi Panen 30.904 Hektar dengan angka Produksi 143.000 Ton. Selain itu Sub kegiatan Normalisasi/restorasi sungai yang telah dikerjakan selama tahun ini telah banyak mendukung keberhasilan sistem irigasi untuk dapat menyalurkan air irigasi melalui saluran primer, sekunder sampai ke petak tersier. Ini dikarenakan menurut output yang telah terealisasi tahun ini sebanyak 154.951 meter sungai telah dilakukan normalisasi sedimentasi tanah/lumpur, raba, sampah sisa kayu/bambu yang menghambat aliran sungai tersebut, sehingga sudah dapat kembali lancar untuk mengairi lahan pertanian khususnya pada irigasi rawa. Kegiatan Normalisasi sungai yang dilaksanakan di Kecamatan Kalumpang, Sungai raya, Padang batung, Angkinang disini lebih bermanfaat pada pencegahan untuk Bencana banjir dan mengurangi genangan yang terjadi pada areal pertanian dikarenakan beberapa sungai primer yang sudah dangkal dan sempit dari existing awal. Untuk di Kecamatan Daha selatan, utara dan barat, dimana selain dapat memperlancar air untuk mengairi areal pertanian dan perkebunan juga berdampak pada lancarnya model transportasi air yang mana mayoritas menjadi keseharian masyarakat di Kecamatan Daha (Nagara).

Selain itu dampak keterlibatan Irigasi Kewenangan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III yaitu Daerah Irigasi Amandit dan Telaga langsung

dalam pencapaian hasil Produksi Pertanian sangat membantu. Daerah Irigasi tersebut mengairi areal sawah di Kecamatan Kandangan, Padang batung, Sungai raya, Telaga langsung dan Angkinang. Harapan kami perlu dilakukan kerjasama dengan pihak BWS terkait pemeliharaan rutin dan Rehabilitasi Daerah irigasi Amandit dan Telaga langsung bahwa beberapa lokasi pintu air dan saluran sekunder yang masih rusak harus selalu dijaga kondisi bangunannya agar dapat maksimal mengairi areal pertanian, sehingga dapat tercapai target Indeks pertanaman di kecamatan dan turut mendukung meningkatnya hasil Panen dan Produktivitas di Kab.HSS.

Berikut ini kami tampilkan grafik perbandingan penambahan Luas fungsional dan pembangunan jaringan irigasi dari Daerah Irigasi Amandit dengan Daerah Irigasi Kewenangan Kab.HSS periode 2020 sampai dengan 2023.





Dari grafik di atas diketahui bahwa pada tahun 2023 telah terdapat 1 Daerah Irigasi Rawa dan permukaan yang dibangun dan mengalami Peningkatan Luas fungsional jaringan irigasi yaitu DIR. Bangkayu. Dimana untuk Irigasi rawa terdapat penambahan 373 ha luas fungsional jaringan irigasi yang telah mengalami peningkatan dengan pembangunan pintu air 4 buah dan normalisasi saluran pada jaringan irigasi rawa 22.401 m. Untuk Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan menghasilkan 1 buah Pembangunan Daerah irigasi/bendung dengan luas areal 177 hektar.

Persentase kinerja sistem jaringan irigasi merupakan indikator sebagai tolak ukur mengetahui kondisi Infrastruktur irigasi, Sehingga semakin baik kondisi jaringan irigasi maka jumlah Luas fungsional sawah yang terairi makin bertambah dan bangunan irigasi dengan kondisi baik yang menjadi kewenangan Kabupaten makin meningkat, dengan rumus perhitungan :

Jumlah ketersediaan air irigasi (1,2 L perdet/ha) pada setiap musim tanam dibagi jumlah ketersediaan air irigasi seluruh hektar x 100 %.

Berdasarkan data hasil survey E-PAKSI Tahun 2023, diketahui :

- Kondisi baik irigasi permukaan = $9.551 \times 1,2 = 11.461$ Ltr/Ha
- Kondisi baik irigasi rawa = $1.810 \times 1,2 = 2.172$ Ltr/Ha

Jadi Persentase kinerja sistem jaringan irigasi adalah :

$$\frac{13.633}{19.027} \times 100 = 71,65 \%$$

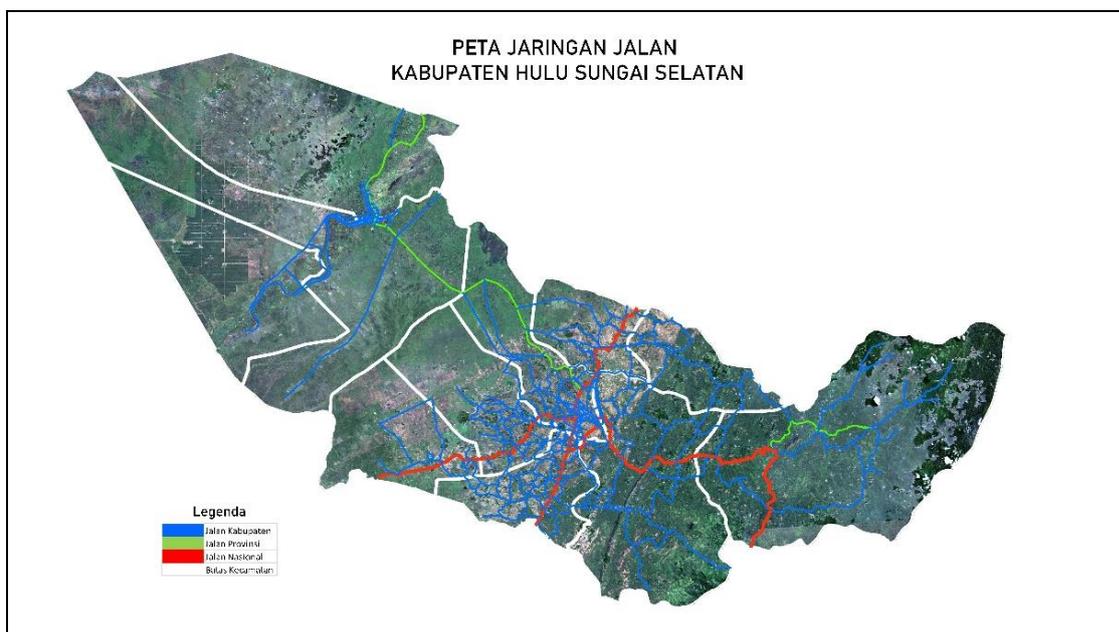
Perhitungan Capaian dari hasil IKU tersebut yaitu hasil pembagian antara jumlah ketersediaan air irigasi (1,2 L perdet/ha) pada setiap musim tanam dibagi jumlah ketersediaan air irigasi seluruh hektar x 100%. Luas areal sawah yang baik pada tahun 2023 ini didapat dari hasil kegiatan dengan penanganan (rehab/peningkatan/pembangunan) pada daerah irigasi. Hasilnya jumlah kondisi baik pada irigasi permukaan telah mencapai 9.551 ha dari total luas Daerah irigasi permukaan 12.116 ha, Sedangkan jumlah kondisi baik luas daerah irigasi rawa 1.810 ha dari total Luas Daerah irigasi rawa 3.740 ha. Selanjutnya apabila dikonversikan dengan jumlah ketersediaan air irigasi total Luas hektar sawah dalam kondisi baik sebesar 13.633 L perdet/ha, dengan jumlah ketersediaan air irigasi pada Luas areal sawah yang menjadi kewenangan kabupaten sejumlah 19.027 L perdet/ha (irigasi permukaan dan rawa). Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa Capaian IKU presentase kinerja sistem jaringan irigasi Tahun 2023 telah melebihi Target yaitu sebesar 71,43%

3.3.1.2 Indikator 2 : Indeks Konektivitas Jalan

Infrastruktur jalan memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastuktur, merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Berbagai fasilitas fisik merupakan hal yang vital guna mendukung

berbagai kegiatan pemerintahan, perekonomian, industri dan kegiatan sosial di masyarakat dan pemerintahan.

Jaringan jalan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 82,95 km sebanyak 7 ruas, Jalan Propinsi sepanjang 53,99 km sebanyak 5 ruas, dan 859,36 km merupakan jalan kabupaten yang terbagi menjadi 325 ruas jalan. Pembagian kewenangan jalan dapat dilihat pada peta berikut ini.



Kondisi geografis Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terdiri dari daerah pegunungan, dataran dan rawa/sungai tentunya ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan memegang peranan penting dalam menunjang peningkatan perekonomian masyarakat. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah berupaya meningkatkan kualitas jalan kabupaten yang menghubungkan antar wilayah kecamatan sampai pedesaan.

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Kinerja “Indeks Konektivitas Jalan”

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline (Realisasi Tahun 2021)	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)
Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi	Indeks Konektivitas Jalan	Indeks	3.622	3,635	3,642	3,649	100.19%

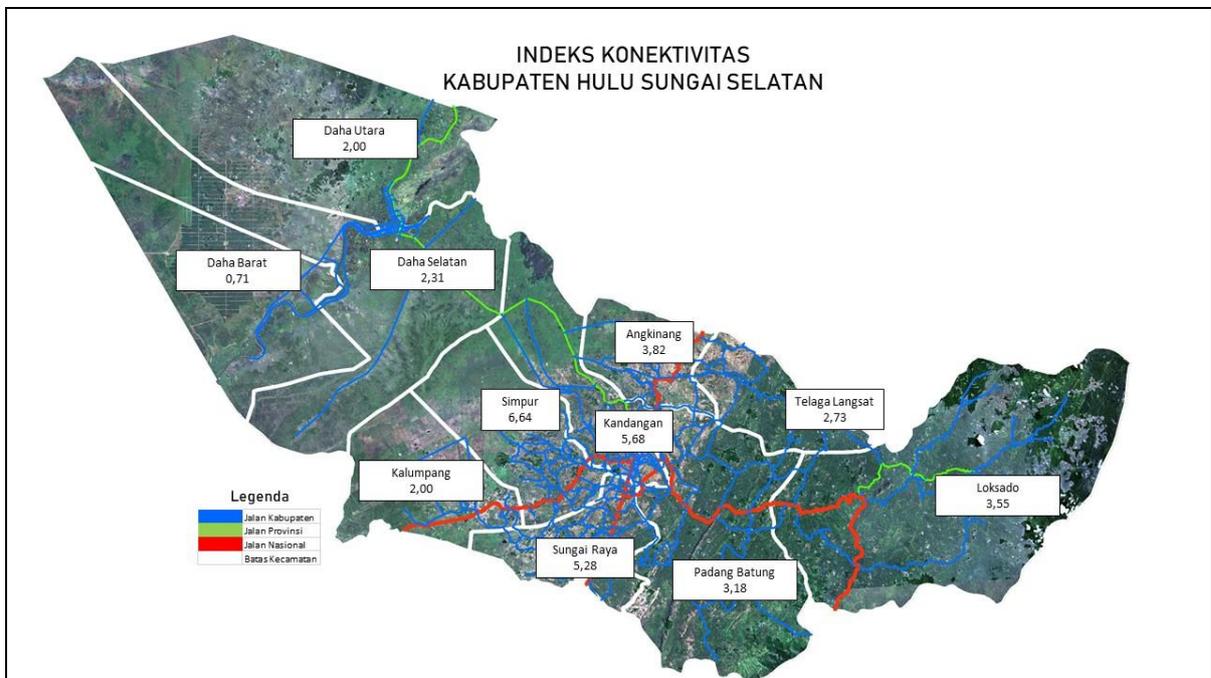
Dalam lingkup Bidang Bina Marga, evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Fokus utama adalah pada Indeks Konektivitas Jalan sebagai indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bidang Bina Marga. Pada tahun 2023, terlihat bahwa realisasi kinerja Indeks Konektivitas Jalan melebihi target yang telah ditetapkan, dengan angka mencapai 100.19% dari target 3.642 menjadi 3.649.

Secara keseluruhan, Bidang Bina Marga berhasil menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kelebihan kinerja pada Indeks Konektivitas Jalan pada tahun tersebut dapat dijelaskan oleh implementasi program swakelola Karya Bhakti, yang melibatkan penambahan ruas jalan baru. Keberhasilan ini dapat dianggap sebagai langkah positif dalam meningkatkan konektivitas jalan, yang menjadi kritis dalam mendukung mobilitas dan pengembangan infrastruktur.

Penting untuk terus memantau dan menganalisis pencapaian kinerja guna memberikan dasar evaluatif yang lebih mendalam terhadap

keberlanjutan dan efektivitas program-program yang dijalankan oleh Bidang Bina Marga. Dengan demikian, perencanaan dan strategi ke depan dapat lebih disesuaikan untuk memaksimalkan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Adapun indkes konektifitas jalan pada masing-masing kecamatan dalam wilayah kabupaten Hulu Sungai Selatan, tampak pada peta berikut ini.



Pada peta tersebut menunjukkan bahwa indeks konektifitas jalan paling tinggi pada Kecamatan Kandangan, dan beberapa Kecamatan sekitar perkotaan yang merupakan daerah dataran seperti Kecamatan Angkinang dan Kecamatan Telaga Langsung, sedangkan yang paling rendah berada pada Kecamatan wilayah daaha yang merupakan daerah rawa.

3.3.1.3 Indikator 3 : Persentase bangunan gedung yang laik fungsi

Capaian Angka Persentase Bangunan Publik yang Laik Fungsi digambar pada tabel berikut.

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Bangunan Publik yang Laik Fungsi

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline (Realisasi Tahun 2021)	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)
Meningkatkan Infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi	Persentase Bangunan Publik yang Laik Fungsi	%	66.66	85,71	100	100	100

Berdasarkan realisasi kinerja pada tabel 3.9 dapat disampaikan bahwa realisasi indikator persentase bangunan publik Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2023 sebesar 100 persen. Dengan target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar 100%, capaian kerjanya sebesar 100% atau masuk kategori Sangat Baik.

Realisasi kinerja indikator persentase bangunan publik Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2023 sebesar 100 % jika dibandingkan dengan realisasi persentase bangunan publik Kabupaten Hulu Sungai Selatan ketercapaian pada tahun 2021 sebesar 66,67% maka terdapat kenaikan 33,34%. Capaian kinerja tahun 2022 sebesar 85,71% dan pada tahun 2023 diperoleh 100% sehingga jika dibandingkan terdapat kenaikan capaian kinerja sebesar 14,29%.

3.3.1.4 Target, Realisasi dan Capaian(%) Indikator Program Pendukung Keberhasilan Pencapaian Sasaran “Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi” dengan indikator Persentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi, Indeks Konektivitas Jalan dan Persentase bangunan gedung yang laik fungsi.

Program pendukung keberhasilan pencapaian indikator Persentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi yaitu program pengelolaan sumber daya air,. Adapun Target, realisasi dan capaian kinerja indikator program tersebut dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut ini.

Tabel 3.10
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Program
Pengelolaan Sumber Daya Air

SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR KERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TAHUN 2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Meningkatkan Infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase luas sawah beririgasi	%	64,34	65,06	101

Capaian indikator persentase luas sawah beririgasi adalah merupakan capaian dari indikator kerja Program Pengelolaan Sumber Daya Air, dimana terdapat kegiatan Pembangunan Daerah irigasi baru yaitu DI.Jelatan di desa asam Kecamatan Sungai raya dengan Luas fungsional 177 hektar, yang berdampak bagi meningkatnya jumlah fungsional sawah yang terairi menjadi 10.674 hektar dari Luas areal (Kepmen) sebesar 16.406 hektar. Perhitungan meningkatnya Presentase luas sawah beririgasi ini dicapai dari Jumlah Luas fungsional Daerah irigasi dibagi Jumlah Luas areal Daerah irigasi (Kepmen) dengan hasil 65,06% dari target 64,76%. Dari Realisasi tersebut dapat kita sampaikan bahwa capaian kinerja dari indikator kerja Program menjadi 101 %. Dengan demikian maka bertambah jumlah Daerah irigasi permukaan kewenangan Kab.Hulu Sungai Selatan menjadi 130 buah dan Daerah irigasi rawa 7 buah dan makin banyaknya areal sawah yang telah teraliri oleh Daerah irigasi baik itu semi teknis dan teknis.

Analisis capaian indikator kinerja Program Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai berikut :

1. Indikator Program Presentase Luas sawah beririgasi, capaian kinerjanya sebesar 101%, capaian tersebut didukung dengan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada Sub Kegiatan Pembangunan Bendung Irigasi yang mana disini dapat terlihat langsung karena menambah Luas Fungsional sawah dari Bendung irigasi yang sudah dibangun sebesar 177 hektar, sehingga menambah jumlah Luas Areal Daerah irigasi permukaan di Kab.HSS. Selain itu terdapat juga penanganan beberapa jaringan irigasi yang mengalami kondisi Rusak sedang/berat yang ditangani melalui Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan, Peningkatan jaringan irigasi dan Rehabilitasi Jaringan irigasi Permukaan, dimana menambah cakupan areal Luas sawah yang terairi dengan merehab beberapa bendung dan membangun 1 bendung, saluran sekunder dan tersier dengan realisasi sepanjang 28.987 meter di beberapa Daerah irigasi permukaan dan rawa, Sehingga nantinya areal sawah yang terairi bisa sampai ke petak tersier para kelompok tani/P3A.
2. Selain itu terdapat Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS). Ini merupakan upaya penanganan daya rusak air yang ditimbulkan pada Daerah Aliran Sungai dan Anak sungai yang mengalir di Kab.HSS, sehingga semua kegiatan dapat mengembalikan kondisi existing sungai yang menunjang agar tersedianya supply air pada beberapa Daerah irigasi sehingga dapat memperlancar air untuk mengairi areal pertanian.

Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai merupakan syarat wajib dalam menjaga supply air dan mencegah bencana banjir, Sehingga beberapa aliran sungai di Kabupaten sangat perlu dilaksanakan Normalisasi sungai, dimana telah terealisasi kegiatan Normalisasi sungai untuk menunjang kawasan pertanian dan pariwisata dengan panjang 154.951 meter. Selain itu ada Sub Kegiatan Pembangunan Bangunan Perkuatan tebing yang merupakan bentuk penanganan dalam menanggulangi dan meminimalis longsornya tebing sungai di dekat permukiman penduduk, kawasan pertanian dan pariwisata dengan output sepanjang 1.318 meter. Harapannya dengan Penanganan di sekitar daerah yang longsor dapat membantu supply air tetap lancar dan daya rusak air bisa terkendali.

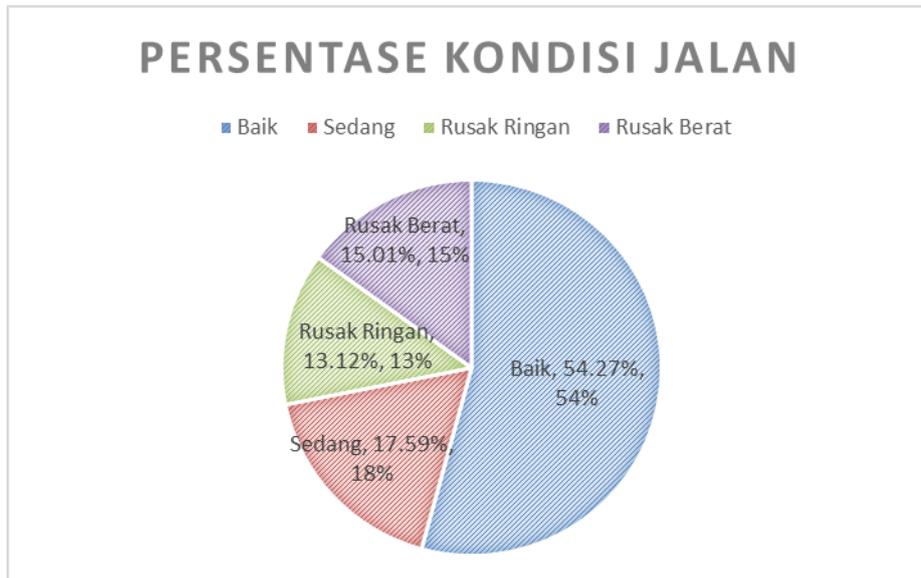
Sedangkan program pendukung keberhasilan pencapaian indikator Indeks Konektivitas Jalan yaitu program penyelenggaraan jalan dan program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase. Adapun Target, realisasi dan capaian kinerja indikator program-program tersebut dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut ini.

Tabel 3.11
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Program
Penyelenggaraan Jalan dan Program Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem Drainase

SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR KERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TAHUN 2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Meningkatkan Infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi	Program penyelenggaraan jalan	Persentase ruas jalan kategori baik dan sedang	%	%	71.86	71.87
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase jaringan drainase perkotaan yang bersih dan bebas genangan	%	73	73	73,00

Analisis capaian indikator kinerja Program Penyelenggaraan Jalan dan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase sebagai berikut :

- 1). Realisasi Kinerja Program Penyelenggaraan Jalan Bidang Bina Marga pada tahun 2023 mengalami kelebihan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Target yang diberikan untuk Persentase ruas jalan kategori baik dan sedang sebesar 71.86%, dan realisasi kinerja yang berhasil dicapai pada akhir tahun mencapai 71.87%. Meskipun peningkatan ini terbilang tipis, namun tetap mencerminkan pencapaian yang positif dalam pelaksanaan program tersebut. Untuk mengetahui kondisi jalan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka pada Tahun 2023 telah dilaksanakan survey kondisi PKRMS (*Provincial/Kabupaten Road Management System*) pada 324 ruas jalan kabupaten dengan metode SDI (*Surface Distress Index*). Metode survey SDI adalah skala kinerja jalan yang diperoleh dari hasil pengamatan secara visual terhadap kerusakan jalan yang terjadi dilapangan. Faktor-faktor yang menentukan penentuan besaran SDI adalah kondisi retak pada permukaan jalan dari total ruas, lebar retak rata-rata jumlah lubang per 100 meter serta kedalaman bekas roda/rutting. Hasil survey tersebut dimasukkan kedalam form SDI yang kemudian dari form tersebut nantinya akan dimasukkan ke form exel RCS aspal/beton atau kerikil/tanah untuk mengetahui kondisi baik, sedang, rusak ringan dan rusak berat. Adapun hasil survey secara ringkas rekapitulasinya disajikan pada diagram berikut ini.



2). Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase melalui Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan pada tahun 2023 didapat panjang saluran drainase yang terbangun sepanjang 14661 m.

Kemudian program pendukung keberhasilan pencapaian indikator Persentase Bangunan Publik yang Laik Fungsi yaitu Program Penataan Bangunan Gedung. Adapun Target, realisasi dan capaian kinerja indikator program tersebut dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut ini.

Tabel 3.12
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Program Penataan Bangunan Gedung

SASARAN RENSTR A	PROGRAM	INDIKATO RKERJA PROGRAM (OUTCAME)	SATUA N	TAHUN 2023		
				TARGE T	REALISAS I	CAPAIAN %
Meningkatkan Infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Publik yang Laik Fungsi	%	100	100	100,00

Analisis capaian kinerja Program Penataan Bangunan Gedung sebagai berikut :

- 1). Pada tahun 2023 ditargetkan akan dibangun 3 bangunan publik, dan hal ini telah terbangun yaitu Perluasan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Rehabilitasi Asrama Bukhari dan Rehabilitasi Asrama Minggu Raya, sehingga tercapai 100%.
- 2). Di dalam Renstra DPUTR Tahun 2019-2023 bahwa sampai akhir pelaksanaan Renstra Tahun 2023 ditetapkan 21 buah bangunan publik. Sampai pelaksanaan tahun lalu sudah terbangun 18 buah bangunan strategis dan pada tahun 2023 telah terbangun 3 bangunan yaitu. Dengan demikian sampai dengan pelaksanaan Renstra Tahun 2023 ini telah terbangun sebanyak 21 buah bangunan publik sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

3.3.2 Sasaran 2 : Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Layanan Dasar Air Minum dan Sanitasi Yang Aman

Kinerja sasaran 2 yaitu Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Layanan Dasar Air Minum dan Sanitasi Yang Aman diukur dengan 2 indikator yaitu Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman dan Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak dengan penjelasan berikut ini.

Tabel 3.13
 Hubungan Sasaran, Indikator, Meta Indikator dan Sumber
 Data Sasaran 2 “Meningkatnya akses masyarakat
 terhadap layanan dasar air minum dan sanitasi yang
 aman”

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Meta Indikator	Sumber Data
Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar air minum dan sanitasi yang aman	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	Jumlah Rumah Tangga/KK yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi dibagi Jumlah Total Proyeksi Rumah Tangga se Kab. HSS	Bidang Cipta Karya
	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman	Jumlah Rumah Tangga/KK yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik minimal sesuai haknya dibagi Jumlah Total Proyeksi Rumah Tangga se Kab. HSS	Bidang Cipta Karya

3.3.2.1 Indikator: Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak

Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak dipilih sebagai indikator kinerja karena merupakan salah satu standar pelayanan minimal (SPM) urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten. Air bersih layak adalah air bersih yang bersumber dari air dalam jaringan perpipaan dan air permukaan bukan jaringan perpipaan yang terlindungi dan layak digunakan sebagai sumber air minum setelah dilakukan pengolahan.

Capaian rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak digambar pada tabel berikut.

Tabel 3.14

Target dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline (Realisasi Tahun 2021)	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)
Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar air minum dan sanitasi yang aman	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	%	83.13%	87.01%	90	90,12	100,13

Jumlah penduduk yang telah memiliki akses air bersih sampai dengan tahun lalu sebanyak 48.979 KK dan untuk meningkatkan akses air bersih maka pada tahun 2023 Dinas PUTR Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melaksanakan rehabilitasi, perluasan dan pembangunan sarana prasarana air bersih dengan prioritas kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan keluarga yang memiliki balita stunting. Pada wilayah yang telah tersedia jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM dilaksanakan pemasangan sambungan ke rumah penduduk (SR). Sedangkan pada wilayah yang belum ada jaringan perpipaan dilakukan pembangunan menara air dan sambungan ke rumah penduduk dengan jumlah rumah tangga sasaran sebanyak 1.753 KK. Dengan demikian sampai dengan tahun 2023 jumlah penduduk yang telah memiliki akses air bersih berjumlah 50.732 KK atau jika dibandingkan dengan jumlah KK se Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai 90,12 persentase. Dengan demikian target tercapai, Namun demikian hal ini perlu kerja keras, karena sebaran penduduk perdesaan yang tidak merata dan acak, luasnya wilayah kabupaten sehingga akses perpipaan air minum

mempunyai dana yang lebih besar daripada di daerah perkotaan. Sebagai rencana aksi ke depan akan diupayakan dengan melaksanakan program SPAM perdesaan untuk menjangkau rumah tangga yang belum tersedia jaringan perpipaan air minum yang dikelola PDAM.

Sumber air bersih masyarakat berasal dari jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi seperti air sumur dalam, penampungan mata air. Adapun sebaran jumlah KK yang telah memiliki akses sarana air bersih layak per wilayah kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terlihat pada tabel berikut ini.

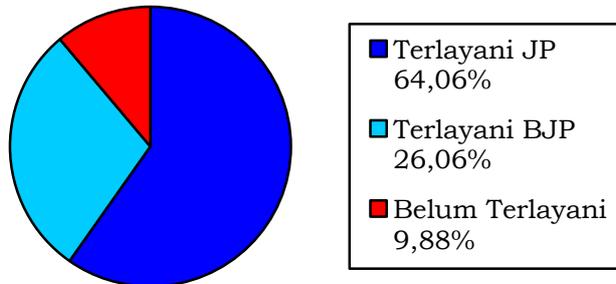
Tabel 3.15
Capaian Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Kab.HSS Tahun 2013

No	Kecamatan	Terlayanai JP Unit Rumah	Terlayanai BJP Unit Rumah
1	Angkinang	4371	792
2	Daha Barat	1133	152
3	Daha Selatan	7308	993
4	Daha Utara	4208	1377
5	Kalumpang	1057	743
6	Kandangan	6578	4438
7	Loksado	1041	1111
8	Padang Batung	2325	1937
9	Simpur	3052	1049
10	Sungai Raya	3344	1398
11	Telaga Langsat	1646	679
Jumlah		36,063	14.669
Total Keseluruhan			50.732 KK
Jumlah KK se Kab.HSS			56.296 KK
Persentase			90,12%

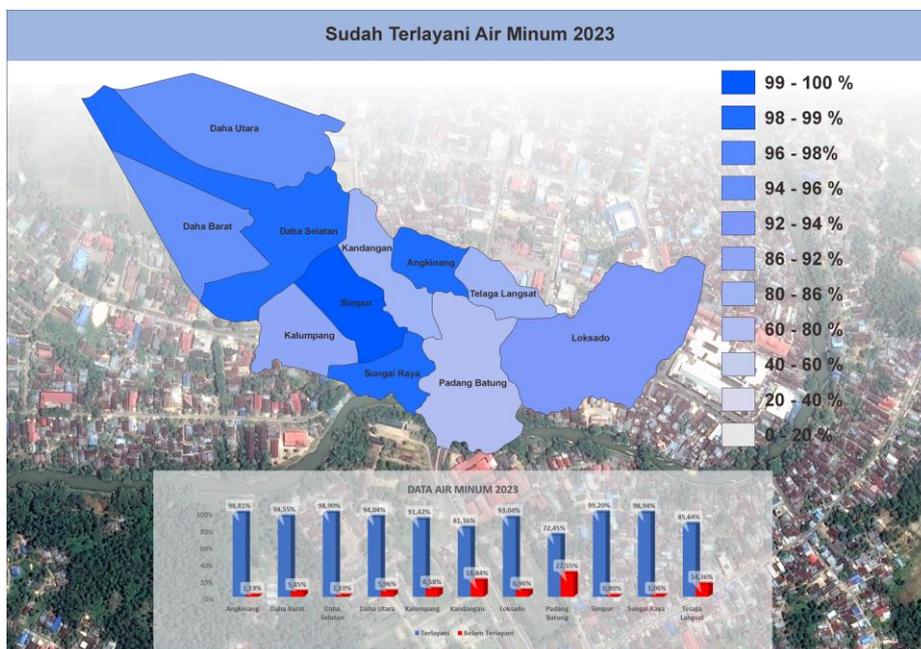
Keterangan :

JP : Jaringan Perpipaan ; BJP : Bukan Jaringan Perpipaan

Grafik Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Kab.Hulu Sungai Selatan Tahun 2023



Pada tabel dan garafik di atas terlihat bahwa sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mendapatkan sumber air bersih melalui jaringan perpipaan, namun sebagian bersumber pada bukan jaringan perpipaan tapi dari sumber lain yang terlindungi, umumnya. Adapun sebaran capaian perwilayah kecamatan lebih jelas dapat dilihat pada peta wilayah dibawah ini.



Pada peta di atas untuk wilayah kecamatan dengan warna biru semakin tua menunjukkan akses masyarakat terhadap air bersih sebagai sumber air minum semakin besar.

Sampai pada tahun 2023 terdapat 120 rumah tangga memiliki akses air bersih dari keluarga yang memiliki bayi stunting. Adapun jumlah anak stunting dengan yang memiliki air bersih dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.16
Jumlah Rumah Tangga Stunting yang Memiliki Akses Air Bersih per Kecamatan sampai dengan Desember 2023

NO	KECAMATAN	JUMLAH STUNTING	MEMILIKI AIR BERSIH
1	PADANG BATUNG	26	7
2	LOKSADO	14	2
3	TELAGA LANGSAT	17	13
4	ANGKINANG	46	12
5	KANDANGAN	78	41
6	SUNGAI RAYA	30	1
7	SIMPUR	27	22
8	KALUMPANG	27	7
9	DAHA BARAT	21	6
10	DAHA SELATAN	32	6
11	DAHA UTARA	12	3
JUMLAH		330	120

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas PUTR juga berkontribusi untuk penanganan keluarga stunting di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3.3.2.2 Indikator: Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik melalui penyediaan pelayanan sanitasi dasar juga merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dan pada akhirnya diharapkan semua penduduk memiliki akses sanitasi

dasar yang layak khususnya sarana prasarana buang air besar. Penuntasan masyarakat untuk tidak buang air sembarangan (BABS) sangat penting dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan desa yang memiliki sertifikat ODF (*open defecation free*). Sampai dengan tahun 2022, beberapa Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mendapatkan sertifikat ODF. Hal ini dapat dilihat pada data tabel di bawah ini.

Tabel. 3.17
Rekapitulasi Desa ODF per Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Desa ODF	Desa belum ODF	Jumlah Desa/Kel
1	Kec. Angkinang	6	5	11
2	Kec. Daha Barat	-	7	7
3	Kec. Dh Selatan	2	14	16
4	Kec. Daha Utara	2	17	19
5	Kec. Kalumpang	6	3	9
6	Kec. Kandangan	12	8	20
7	Kec. Loksado	1	10	11
8	Kec. Padang Batung	11	6	17
9	Kec. Simpur	11	-	11
10	Kec. Sungai Raya	3	13	16
11	Kec. Telaga Langsat	8	3	11
Jumlah		62	86	148

Jumlah Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bebas BABS sampai dengan tahun 2022 sebanyak 62 Desa, namun lebih banyak Desa yang belum bebas BABS yaitu sebanyak 86 Desa/Kalurahan. Hal ini disebabkan disamping karena keterbatasan sarana BAB juga untuk merubah perilaku masyarakat untuk tidak buang air sembarangan perlu waktu khususnya masyarakat yang tinggal dekat dengan bantaran sungai dimana

sampai tahun 2022 jumlah rumah tangga yang memiliki akses sanitasi sebanyak 48.097 KK.

Dinas PUTR secara terus menerus melaksanakan kegiatan pembangunan WC masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah baik melalui anggaran APBD maupun DAK yang pada tahun 2023 sebanyak 1131 KK, sehingga keseluruhan penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2023 yang memiliki akses sanitasi layak sebanyak 49.228 KK.

Maka persentase penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang terlayani sanitasi dasar Tahun 2023 diperoleh dengan Perhitungan:

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah KK yang mendapatkan akses air limbah yang} \\ & \text{memadai dibagi jumlah KK se Kab.HSS} \\ & = \frac{49.228\text{KK}}{56.296 \text{ KK}} = 87,44\% \end{aligned}$$

Adapun jumlah KK yang telah memiliki akses Sanitasi per wilayah kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terlihat pada tabel berikut ini.

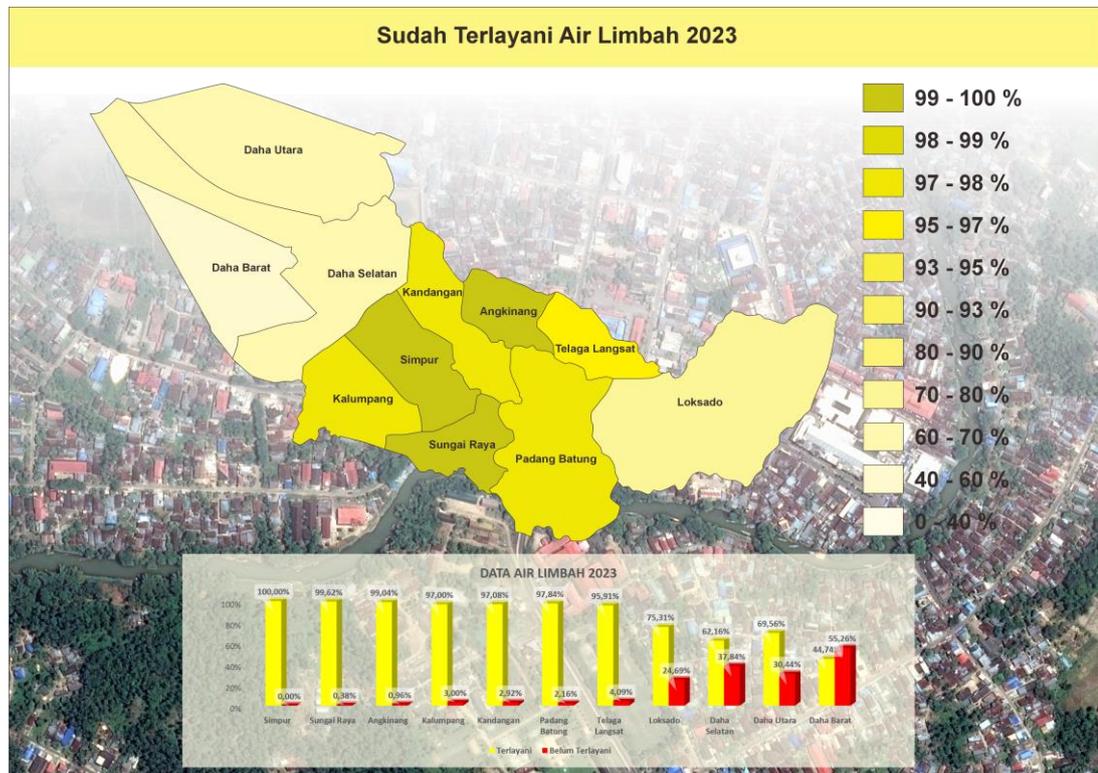
Tabel. 3.18
Capaian Pemenuhan Kebutuhan Sanitasi
Kab.Hulu Sungai Selatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Target		Realisasi						
		Total	Tanpa Akses	JSP	JSP	JSP	Sharing	Akses Dasar (JSP + JSPP + Sharing)	Akses Layak (JSP + JSPP)	Akses Aman SPALD-S (JSP)
1	Simpur	4134	0	3786	323	25	4134	4109	3786	101
2	Sungai Raya	4793	18	4340	432	3	4775	4772	4340	342
3	Angkinang	5225	50	4402	773	0	5175	5175	4402	127
4	Kalumpang	1969	59	1554	356	0	1910	1910	1554	0
5	Kandangan	13573	397	12261	854	61	13176	13115	12261	607
6	Padang Batung	5883	127	4927	714	115	5756	5641	4927	88
7	Telaga Langsat	2715	111	2120	458	26	2604	2578	2120	0
8	Loksado	2313	571	1579	49	114	1742	1628	1579	0
9	Daha Selatan	8393	3176	3703	1392	122	5217	5095	3703	86
10	Daha Utara	5939	1808	3159	926	46	4131	4085	3159	311
11	Daha Barat	1359	751	546	62	0	608	608	546	0
Total		56296	7068	42377	6339	512	49228	48716	42377	1662
Persentase Layanan							87.44%	86.54%	75.28%	2.95%
Capaian SPM Akses Dasar							87.44%			

Keterangan :

JSP : Jamban Sehat Permanen ; JSPP : Jamban Sehat Semi Permanen ; Sharing : Masih Menumpang Jamban Sehat

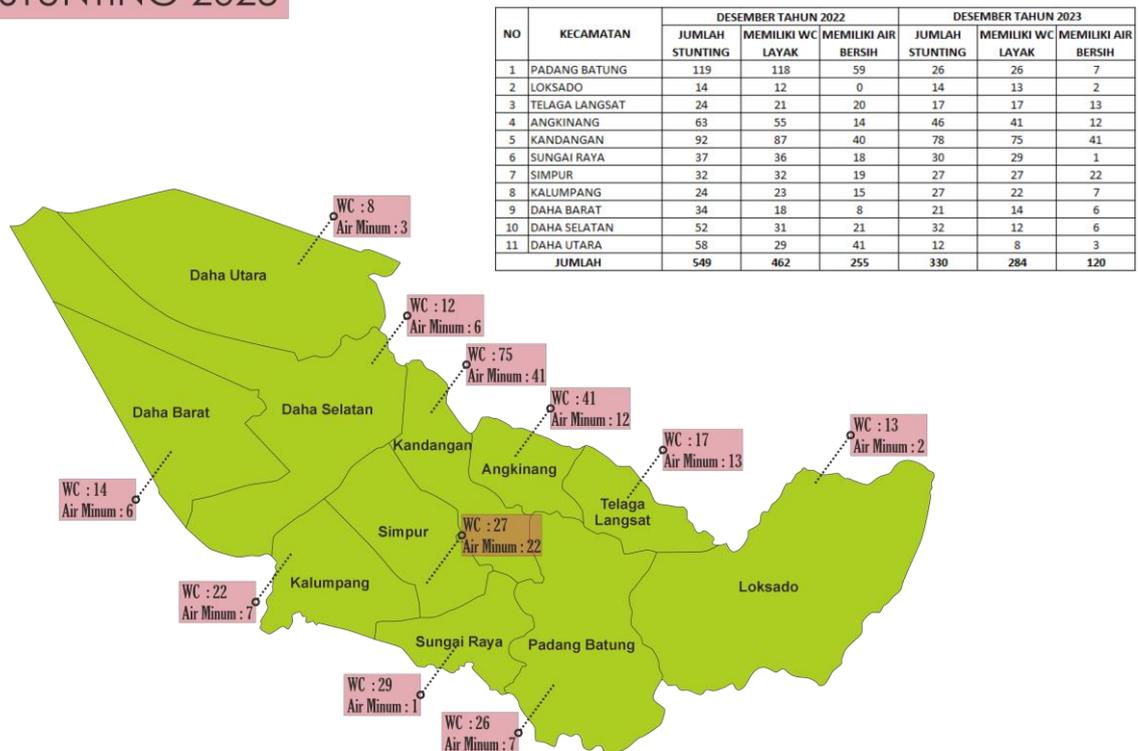
Sebaran akses sanitasi per wilayah Kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk jelasnya dapat dilihat pada peta berikut ini.



Pada peta di atas menunjukkan wilayah Kecamatan dengan warna lebih tua masyarakatnya memiliki akses sanitasi lebih tinggi dari pada warna yang lebih muda, dimana Kecamatan Simpur tercatat memiliki akses sanitasi paling tinggi sedangkan yang terendah pada wilayah Kecamatan Daha Barat. Hal ini terjadi karena masih adanya tradisi kebiasaan masyarakat untuk buang air besar di sungai.

Selain dalam pemenuhan dasar akses sanitasi, juga mendukung dalam penurunan stunting dengan capaian sebagai berikut :

STUNTING 2023



Adapun capaian Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.19

Target dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline (Realisasi Tahun 2021)	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)
Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar air minum dan sanitasi yang aman	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman	%	83.64%	84.44%	85,00	87,44	102,87

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi realisasi kinerja atas penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik telah mencapai target yang ditetapkan. Namun demikian dalam mencapai

target tersebut cukup berat. Hal ini karena adanya kebiasaan turun menurun masyarakat khususnya yang tinggal dibantaran sungai amandit dan Negara yang buang air di sungai. Hal ini akan menjadi perhatian yang serius dalam rangka meningkatkan sanitasi masyarakat yang layak. Adapun rencana aksi ke depan yang dilakukan dengan melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup sehat (PHBS).

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Renstra DPUTR 2019-2023. pada pelaksanaan tahun 2023 ini ditemui kendala pendanaan yang besar untuk memenuhi seluruh akses sanitasi layak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan membangun bilik serta tangka septik berstandar di 3 tipe wilayah seperti pegunungan, rawa dan datar yang memerlukan penanganan berbeda-beda. Namun demikian DPUTR berkomitmen untuk terus berupaya mencapai dengan melakukan beberapa langkah yang akan ditempuh antara lain :

- 1). Terus mengupayakan mencari sumber pembiayaan melalui DAK dan program hibah pemerintah pusat untuk membangun akses sanitasi layak.
- 2). Peningkatan alternatif peluang pendanaan tidak hanya dari Pemerintah daerah atau pusat tapi juga Non Pemerintah
- 3). Mengajukan usulan rencana kegiatan anggaran (RKA) tahun 2024 melalui anggaran APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3.3.2.3 Target, Realisasi dan Capaian(%) Indikator Program Pendukung Keberhasilan Pencapaian Sasaran “Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar air minum dan sanitasi yang aman” dengan indikator “Persentase rumah

tangga yang mendapatkan akses air minum layak dan Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman

Program untuk mendukung Ketercapaian Indikator kinerja persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak yaitu Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) . Adapun capaian program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.20
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR KERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN INDIKATOR	TAHUN 2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar air minum dan sanitasi yang aman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Persentase rumah tangga berpenghasilan rendah yang dapat mengakses sarana air minum layak	Persen	92,65%	92,65%	100%
		Persentase rumah tangga beresiko stunting yang dapat mengakses sarana air minum layak	Persen	50,84%	51,05%	100,41%

Analisis Capaian Kinerja Indikator Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pembangunan SPAM Perdesaan pada Kec. Angkinang Desa Kayu abang dan Desa Tawia, Kec. Daha Barat Desa Tanjung Selor, Kec. Daha Utara Desa Paharangan dan Desa Paungkan, Kec. Kalumpang Desa Karang Paci dan Desa Balanti, Kec. Kandangan Desa Bangkau Desa Lungau Desa Sungai Kupang dan Desa Sungai Paring, Kec. Padang Batung Desa Malutu, Kec. Sungai Raya Desa Batang Kulur Tengah dan Kec. Telaga Langsat Desa Gumbil
2. Pembangunan SPAM pada Ponpes Abdul Karim Kec. Daha Utara, Ponpes Ad Dahlaniah Kec. Daha Utara, Ponpes Babussalam Kec. Padang Batung dan Ponpes Darul Ikhwan Kec. Daha Selatan
3. Perluasan SPAM Kec. Daha Barat Desa Bajayau Lama, Kec. Daha Selatan Desa Tambangan, Kec. Daha Utara Desa Pakan Dalam Desa Hakurung Desa Hamayung dan Desa Panggandingan, Kec. Loksado Desa Lumpangi, Kec. Sungai Raya Desa Sarang Halang
4. Peningkatan SPAM pada Kec. Angkinang Desa Taniran Selatan dan Bambi, Kec. Daha Utara Desa Tambak Bitin, Kec. Kalumpang Desa Balanti, Kec. Kandangan Desa Sungai Paring dan Lungau, Kec. Simpur Desa Pantai Ulin dan Desa Kapuh



Pembangunan SPAM Perdesaan berupa bangunan menara air



Pemasangan Sambungan Rumah (SR)



Pemasangan Jaringan Perpipaan

5. Rehabilitasi SPAM pada PMA Desa Hamak Utara Kec. Telaga Langsat dan Pompa Minhajul Abidin Kec. Sungai Raya



Pengerjaan Sumur Bor

Permasalahan pencapaian Rumah tangga yang memiliki akses sarana air bersih layak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2023 belum mencapai target yang ditetapkan dikarenakan sebaran penduduk perdesaan yang tidak merata dan acak, luasnya wilayah kabupaten sehingga akses perpipaan air bersih membutuhkan dana yang lebih besar daripada di daerah perkotaan. Untuk memperluas akses air bersih akan selalu diupayakan untuk memperoleh sumber pendanaan disamping dari APBD melalui DAU juga usulan kegiatan DAK.

Sedangkan program untuk mendukung Ketercapaian Indikator kinerja persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman yaitu Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah . Adapun capaian program tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.21
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Program
Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATORKERJA PROGRAM (OUTCAME)	SATUAN INDIKATOR	TAHUN 2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar air minum dan	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga berpenghasilan rendah yang dapat mengakses sarana sanitasi Aman	%	92,03%	87,44%	95,01%

sanitasi yang aman		Persentase rumah tangga beresiko stunting yang dapat mengakses layanan sanitasi aman	%	94,74%	87,88%	92,76%
--------------------	--	--	---	--------	--------	--------

Untuk menunjang pencapaian kinerja akses sarana sanitasi layak, dilaksanakan Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah melalui Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota. Dalam bentuk sebagai berikut

- b. Pembangunan SPALD JAGAT (Jamban Keluarga Sehat) pada Kec. Angkinang Desa Telaga Sili-Sili, Taniran Kubah, Taniran Selatan, Bakarung dan Tawia. Kec. Daha Barat Desa Tanjung Selor dan Baru. Kec. Daha Selatan Desa Tambangan, Muning Baru, Muning Tengah, Habirau Tengah dan Parigi. Kec. Daha Utara Desa Baruh Kembang, Pakan Dalam, Hamayung Utara, Pakapuran Kecil, Murung Raya, Paramaian, Mandala Murung Masjid, Belah Paikat, Pasungkan, Teluk Haur dan Hakurung. Kec. Kalumpang Desa Balanti, Sirih Hulu dan Tambingkar. Kec. Kandangan Desa Bangkau, Jambu Hilir dan Kelurahan Kandangan Kota. Kec. Loksado Desa Ulang dan Mawangi. Kec. Padang Batung Desa Jalatang dan Kec. Telaga Langsung Desa Mandala, Gumbil, Pakuan Timur dan Pandulangan.



Jamban Keluarga Desa Ulang



Jamban Keluarga Desa Balanti

- c. Pembangunan Tangki Septik Individual Perdesaan Minimal 50 KK (DAK Reguler) Kec. Angkinang Desa Tawia, Bamban dan Bamban Utara. Kec. Padang Batung Desa Malutu, Karang Jawa dan Tabihi



Septik tank Desa Bamban

- d. Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10) KK (DAK Reguler) Kec. Angkinang Desa Kayu Abang dan Taniran Selatan. Kec. Daha Barat Desa Bajayau lama, Baru dan Siang Gantung. Kec. Daha Selatan Desa Samuda, Banua Hanyar dan Baruh Jaya. Kec. Daha Utara Desa Sungai Garuda. Kec. Padang Batung Desa Jalatang



Pembangunan IPALD Desa Banua Hanyar

- e. Pembangunan SPALD BBM (Bersuci, Berwudhu, Mandi) pada Majelis Raudhatul Firdaus Pagar Haur Kec. Padang Batung, Ponpes Darul Ikhwan Kec. Daha Selatan, Ponpes Darul Amin Kec. Daha Utara, Ponpes Ibnu Mas'ud Putra Kec. Sungai Raya, Majelis Abu Huarairah Kec. Simpur, STAI Darul Ulum Kec. Kandangan dan Majelis At Tanwir Kec. Simpur



Pembangunan SPALD BBM

- f. Program Gebrak Sehati (Gerakan Pembangunan Bersama Berkelanjutan Seribu Sarana Sanitasi dan Air Minum Sehat) Lokasi Kec. Kandangan, Sungai Raya, Kalumpang, Padang Batung dan Loksado.



Desa Batu Laki
Kec. Padang Batung



Desa Batang Kulur Kiri
Kec. Sungai Raya

Permasalahan yang sering ditemui di lapangan yaitu kesadaran masyarakat untuk hidup sehat dengan merubah kebiasaan tidak buang air sembarangan masih kurang, khususnya masyarakat yang tinggal di bantaran sungai yang terbiasa dengan buang air besar di jamban langsung ke sungai. Disamping itu juga adanya keterbatasan anggaran untuk menyediakan septik yang memenuhi standar untuk buang air besar.

3.3.3 Sasaran 3 : Meningkatnya kepatuhan penggunaan tata ruang sesuai dengan peruntukannya

Kinerja sasaran 3 yaitu Meningkatnya Kepatuhan Penggunaan Tata Ruang Sesuai dengan Peruntukannya diukur dengan 1 indikator yaitu indikator Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 3.22

Hubungan Sasaran, Indikator, Meta Indikator dan Sumber Data Sasaran 3 “Meningkatnya kepatuhan penggunaan tata ruang sesuai dengan peruntukannya”

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Meta Indikator	Sumber Data
Meningkatnya kepatuhan penggunaan tata ruang sesuai dengan peruntukannya	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang	Persentase pemenuhan regulasi penataan ruang dan pemenuhan pemanfaatan serta pengendalian tata ruang . Rumus : 50% (Pemenuhan dokumen RTRW dan RDTR) + 50% (Pemenuhan Rekomendasi pemanfaatan ruang sesuai tata ruang)	Dokumen RTRW dan RDTR, Dokumen KKPR dan KRK

Kinerja Indikator sasaran yaitu Meningkatkan Kepatuhan Penggunaan Tata Ruang Sesuai dengan Peruntukannya pada Tahun 2023 digambarkan sebagai berikut.

3.3.3.1 Indikator: Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang

Capaian Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang digambar pada tabel berikut.

Tabel 3.23

Target dan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline (Realisasi Tahun 2021)	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)
Meningkatnya kepatuhan penggunaan tata ruang sesuai dengan peruntukannya	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang	%	75	80	100	100	100

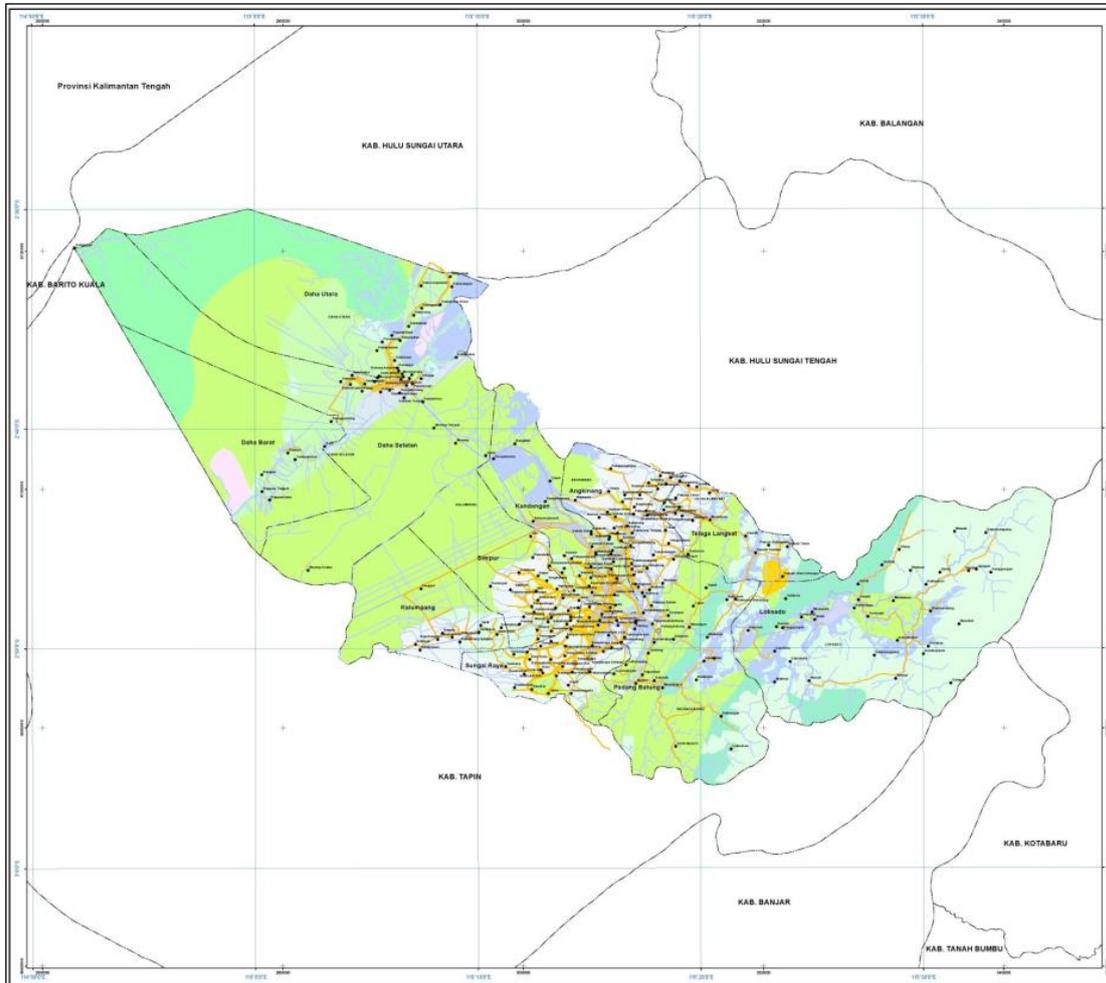
Berdasarkan realisasi kinerja pada tabel 3.23 dapat disampaikan bahwa realisasi indikator Persentase Kesesuaian Pelaksanaan

Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2023 berdasarkan sebesar 100%. Dengan target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja tahun 2023 sebesar 100%, capaian kinerjanya sebesar 100% atau masuk kategori Sangat Baik. Capaian persentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana tata ruang dihitung berdasarkan Persentase pemenuhan regulasi penataan ruang dan pemenuhan pemanfaatan serta pengendalian tata ruang, yaitu dengan rumus 50% (Pemenuhan dokumen RTRW dan RDTR) + 50% (Pemenuhan Rekomendasi pemanfaatan ruang sesuai tata ruang).

Realisasi kinerja indikator persentase pemenuhan regulasi penataan ruang dan pemenuhan pemanfaatan serta pengendalian tata ruang pada tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan realisasi ketercapaian pada tahun 2022 sebesar 80% maka terdapat kenaikan 20%. Capaian kinerja tahun 2022 sebesar 85,10% dan pada tahun 2022 diperoleh 100% sehingga jika dibandingkan terdapat kenaikan capaian kinerja sebesar 14,9%.

Realisasi indikator persentase pemenuhan regulasi penataan ruang dan pemenuhan pemanfaatan serta pengendalian tata ruang pada tahun 2023 sebesar 100% jika dibandingkan dengan realisasi target terakhir Renstra tahun 2023 sebesar 100% maka realisasi tahun 2023 sudah mencapai targetnya.

Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Faktor keberhasilan Sasaran Strategis Meningkatnya Kepatuhan Penggunaan Tata Ruang Sesuai dengan Peruntukannya dengan indikator “Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang” tahun 2023 didukung dengan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang yang diampu oleh Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi yaitu dengan berbagai upaya dilakukan untuk pemenuhan dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta Pemenuhan Rekomendasi pemanfaatan ruang sesuai tata ruang. Kegiatan untuk pemenuhan dokumen tersebut yaitu Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Ruang

dengan alokasi anggaran yang telah di berikan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar Rp. 2.859.135.500,00 (dua miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang di dalamnya memuat :

- 1). Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota dan didalamnya terdapat subkegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 546.406.500,00 (lima ratus empat puluh enam juta empat ratus enam ribu lima ratus rupiah), didalamnya mengakomodir Honorarium Narasumber Konsultasi Publik perda RTRW dan RDTR serta Narasumber Penyusunan Persetujuan Substansi Revisi RTRW dan RDTR dengan alokasi dana sebesar Rp. 254.550.000,00 (dua ratus lima puluh empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Pada kegiatan ini realisasi anggarannya sebesar Rp. 94.862.346,00 (Sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah) dengan persentase 17,36%



FGD RDTR Perkotaan Kandangan & RDTR Perkotaan Padang Batung

- 2). Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota dan didalamnya terdapat subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.148.225.000,00 (dua miliar seratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), didalamnya mengakomodir Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tim Swakelola dengan alokasi dana sebesar Rp. 9.475.000,00 (Sembilan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), Pelaksanaan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RTRW, RDTR Perkotaan Kandangan, dan RDTR Perkotaan Padang Batung dengan alokasi dana sebesar Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), Pembuatan Peta Dasar Skala 1:5000 dan skala 1:25000 dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah). Pada kegiatan ini realisasi anggarannya sebesar Rp. 1.652.800.008,00 (satu miliar enam ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu delapan rupiah) dengan persentase 76,93%.



FGFGD KLHS Revisi RTRW, RDTR
Perkotaan Kandangan dan Perkotaan
Padang Batung



Konsultasi Publik KLHS Revisi RTRW,
RDTR Perkotaan Kandangan dan
Perkotaan Padang Batung

- 3). Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota dan didalamnya terdapat subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 164.504.000,00 (seratus enam puluh

empat juta lima ratus empat ribu rupiah), didalamnya mengakomodir Honorarium Narasumber Kabupaten dan Provinsi Rapat Forum Penataan Ruang (FPR) dan Makan minum rapat FPR dengan alokasi dana sebesar Rp. 92.400.000,00 (Sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), dan Pembayaran Jasa Tenaga Administrasi dengan alokasi dana sebesar Rp. 46.488.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Pada kegiatan ini realisasi anggarannya sebesar Rp. 73.081.630,00 (tujuh puluh tiga juta delapan puluh satu ribu enam ratus tiga puluh rupiah) dengan persentase 44,42%.

3.3.3.2 Target, Realisasi dan Capaian (%) Indikator Program Pendukung Keberhasilan Pencapaian Sasaran “Meningkatnya Kepatuhan Penggunaan Tata Ruang Sesuai dengan Peruntukannya” dengan Indikator Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Tahun 2023

Program untuk mendukung Ketercapaian Indikator Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang yaitu Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. Adapun Target, realisasi dan capaian kinerja indikator program tersebut sebagaimana dijelaskan dalam tabel 3.24

Tabel 3.24
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Program
Penyelenggaraan Penataan Ruang

SASARAN RENSTRA	PROGRAM	INDIKATOR KERJA PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN INDIKATOR	TAHUN 2023		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
Meningkatnya kepatuhan penggunaan tata ruang sesuai dengan peruntukannya	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	dokumen	1	1	100
		Persentase pemenuhan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	%	54	54	100
		Persentase rekomendasi perijinan yang sesuai dengan tata ruang wilayah	%	100	100	100

Analisis Capaian Kinerja Indikator Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Indikator :

- 1). Jumlah peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mencapai 1 dokumen dari target 1 dokumen dengan capaian 100% dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah memiliki Peraturan Daerah tentang RTRW, yaitu Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2013-2032. Saat ini sedang dilakukan Revisi RTRW tersebut, yang mana updating materi teknis Revisi RTRW sudah dilaksanakan pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2023 dilaksanakan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RTRW dan proses penyusunan dokumen persetujuan substansi Revisi RTRW serta untuk pemutakhiran peta dasar skala 1:25000 dilaksanakan secara swakelola oleh Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim Badan Informasi Geospasial;
- 2). Persentase pemenuhan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

sebesar 54% dari target 54% dengan capaian 100%. Saat ini, Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah memiliki 6 (enam) draft dokumen RDTR. Pada tahun 2022 telah dilakukan updating materi teknis RDTR Perkotaan Kandangan dan Perkotaan Padang Batung. Sedangkan pada tahun 2023 ini telah dilaksanakan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RDTR Perkotaan Kandangan dan Perkotaan Padang Batung, serta Pembuatan Peta Dasar Skala 1:5000. Pembuatan Peta Dasar Skala 1:5000 dilaksanakan dengan bekerjasama dengan Pusat Kajian Penataan Ruang (PKPR) Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Pada tahun 2023 juga dilaksanakan proses penyusunan dokumen persetujuan substansi dengan didampingi oleh tenaga ahli.

- 3). Persentase rekomendasi perijinan yang sesuai dengan tata ruang wilayah sebesar 100% dari target 100% dengan capaian 100%, hal ini dapat dijelaskan bahwa rekomendasi perijinan yang dikeluarkan/diterbitkan sudah sesuai dengan tata ruang wilayah. Sebagai bentuk pengendalian tata ruang, bidang tata ruang juga melakukan rapat Forum Penataan Ruang (FPR) Daerah untuk membahas permohonan yang masuk dengan kasus lahan yang dimohonkan tidak sesuai dengan peruntukan di Peraturan RTRW Kabupaten. Rapat tersebut juga mengundang SKPD terkait. Rapat FPR menghasilkan Berita Acara Hasil Rapat serta Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) atau Keterangan Rencana Kota (KRK).

3.4 Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas PUTR Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023.

Untuk mengetahui perkembangan realisasi Indikator Kinerja utama sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari awal pelaksanaan Renstra Tahun 2019 sampai dengan tahun terakhir pelaksanaan Renstra DPUTR Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 3.25

Tabel 3.25
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi	Indeks Konektivitas Jalan	3.581	3.595	3.622	3.635	3,649
	Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	61,9%	65,60%	68,49%	70.47%	71.65%
	Persentase bangunan gedung yang laik fungsi	23,80%	47,52%	66,66%	85.71%	23,80%
Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar air minum dan sanitasi yang aman	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman	81,00%	82,35%	83,64%	85.44%	100%
	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	77,96%	80,34%	83,13%	87.01%	97.77%
Meningkatnya kepatuhan penggunaan tata ruang sesuai dengan peruntukannya	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang	75%	75%	75%	80%	100%

Analisis progress realisasi Indikator kinerja utama tahun 2019-2021 dapat dijelaskan berikut ini :

- a. Indeks konektivitas jalan dari tahun ke tahun semakin meningkat, hal ini karena adanya pembangunan ruas jalan baru yang menghubungkan antar wilayah, sehingga menambah nilai indeks

konektivitas.

- b. Kinerja system jaringan irigasi meningkat setiap tahunnya, karena adanya pembangunan dan rehabilitasi saluran drainase dalam kewenangan kabupaten.
- c. Bangunan gedung untuk pelayanan publik yang laik fungsi, terus meningkat, karena adanya pembangunan maupun rehabilitasi gedung.
- d. Perkembangan capaian Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman mulai tahun 2019-2023 mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.
- e. Akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih di Kabupaten Hulu Sungai Selatan selalu meningkat dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari pada tahun sebelumnya. Hal ini Karena tahun 2023 adalah pasca pandemic covid-19 sehingga anggaran bisa digunakan untuk pembangunan fisik.
- f. Perkembangan realisasi persentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana tata ruang dari tahun 2019 menunjukkan kondisi yang selalu meningkat

3.5 Perbandingan Capaian Realisasi Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Capaian Relaisasi Tingkat Nasional Tahun 2023

Perbandingan capaian realisasi Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 dengan capaian relaisasi Tingkat Nasional Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 3.26 dibawah ini.

Tabel 3.26
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Tingkat Nasional Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	
			Dinas PUTR	Nasional
1.	Indeks Konektivitas Jalan	Indeks	3,649	-
2.	Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	%	71.65%	-
3.	Persentase bangunan gedung yang laik fungsi	%	100%	-
4.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman	%	87,44%	80,92%
5.	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	%	97.77%	91,05%
6.	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang	%	100%	-

Dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama hanya ada 2 (dua) Indikator yang dapat diperbandingkan dengan realisasi capaian tingkat nasional yaitu indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman dan indikator Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak, dimana realisasi tingkat kabupaten di atas realisasi tingkat nasional. Hal ini karena kedua indikator tersebut merupakan indikator SPM Urusan wajib pelayanan dasar yang merupakan kinerja nasional dan juga diemban oleh Dinas PUTR selaku pengampu urusan wajib pelayanan dasar bidang air minum dan sanitasi, sednagkan indikator lainnya tidak menjadi ukuran kinerja nasional sehingga tidak bisa disandingkan.

3.6 Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas Keuangan menjelaskan Realisasi Anggaran Belanja per Sasaran SKPD yang mendukung secara langsung Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan penjelasan sebagai berikut :

3.6.1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dan capaian kinerja (%) Sasaran ke -1 “Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi” .

Tabel 3.27

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang Secara Langsung Mendukung Ketercapaian Indikator “Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi”

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan dan Satuan		Target Kinerja dan Pagu Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023	
		Indikator	Satuan	Output/ Outcame	Pagu Anggran (Rp.)	Outcame/ Output	Realisasi Anggaran (Rp.)
Program Pengelolaan Sumber Daya Air							
Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
1	Pembangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun	Meter	769	11.912.450.000	1.250	11.783.294.200,-
2	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Direhabilitasi	Meter	42	472.500.000,-	68	469.224.000,-
3	Normalisasi/ Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Meter	118.400	17.690.844.400,-	154.951	17.441.506.446,-
4	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	51.670.000,-	20	34.835.000,-
Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							

1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun	Dokumen	23	2.528.000.000,-	23	2.441.630.700,-
2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	meter	1.800	2.149.650.000,-	2.478	2.129.872.100,-
3	Pembangunan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Buah	1	238.450.000,-	1	237.482.000,-
4	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan	Meter	2.871	4.512.601.918,-	2.441	4.371.337.716,-
5	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Jumlah Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang ditingkatkan	Meter	16.343	3.715.059.822,-	22.401	3.701.313.502,-
6	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Meter	1.663	2.642.751.296,-	1.668	2.619.090.974,-
7	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung yang direhabilitasi	Buah	3	692.150.000,-	3	686.225.600,-
8	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Meter	6.900	904.100.000,-	6.900	900.010.068,-
9	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Beroperasi	Orang	9	209.196.000,-	9	195.449.760,-

Program Penyelenggaraan jalan

penyelenggaraan jalan kabupaten/kota

1	pembangunan jalan	Panjang Jalan yang dibangun	Km	0.3	1.960.683.200	0	1.960.683.200
2	pelebaran jalan menuju standar	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran Menuju Standar	Km	12	471.469.685	12	471.469.685
3	rekonstruksi jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	Km	15	35.379.363.395	17.97	33.253.258.384
4	rehabilitasi jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi	Km	18.5	50.016.355.153	25.86	48.653.216.784
5	pemeliharaan berkala jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Km	24	25.328.562.678	52.5	23.614.480.113
6	pemeliharaan rutin jalan	Panjang Jalan yang diperbaiki dengan pemeliharaan rutin	Km	4	3.026.244.000	4.8	3.007.696.690
7	pembangunan jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun	m	120	10.449.700.000	55	2.283.528.800
8	penggantian jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian	m	30	6.664.306.500	23.76	5.487.807.631
9	pemeliharaan rutin jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan pemeliharaan rutin	m	50	1.690.244.000	308.25	1.392.706.200
10	rehabilitasi jembatan	Panjang Jembatan yang direhabilitasi	m	50	3.289.138.000	224.02	2.973.032.957
11	survei kondisi jalan/jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	dok	1	601.750.000	1	553.000.000

Program Penataan Bangunan Gedung

Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupatenkota pemberian izin mendirikan bangunan imb dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung

1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten /Kota (DAU)	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3	34.142.994.823,00	3	39.007.118.478,00
---	--	---	---------	---	-------------------	---	-------------------

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

1	Pembangunan system drainase perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan Yang Dibangun	m	14000	2.004.500.000,00	14661	2.338.500.000,00
2	Rehabilitasi saluran drainase perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan Yang Dilakukan Rehabilitasi	m	14000	955.400.000,00	14327	955.400.000,00
3	Operasi dan pemeliharaan system drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	m	14000	575.944.000,00	14364	1.075.944.000,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk menunjang kinerja Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi telah dilaksanakan 4 (empat) program, dengan penjelasan sebagai berikut :

1). Program Pengelolaan Sumber Daya Air, yang didalamnya terdiri beberapa kegiatan dan sub kegiatan, sebagai berikut :

1.1 Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ;

a. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing memiliki pagu anggaran Rp.11.912.450.000,- pada kegiatan ini telah terlaksana pekerjaan Pembangunan perkuatan tebing dengan pemasangan bronjong dan pembangunan pasangan batu di berbagai wilayah tebing Daerah aliran sungai Kab.HSS yang mengalami rawan longsor dengan panjang realisasi konstruksi

1.250 meter, yang mana output dari kegiatan ini sangat bermanfaat untuk melindungi longsor padatebing sungai di permukiman penduduk dan daerah pertanian dan pariwisata yang berada di sekitar bantaran sungai. Realisasi dari pagu anggaran pada sub kegiatan ini yaitu Rp.11.783.294.200 dengan presentase realisasi keuangan 98,92% dan realisasi fisik 165%.

- b. Normalisasi/Restorasi Sungai memiliki pagu anggaran Rp.17.690.844.400,-. Pada Sub kegiatan ini merupakan salah satu sub kegiatan yang paling banyak paket pekerjaan dan anggaran, dikarenakan manfaat dari hasil pekerjaan normalisasi sungai selain sebagai penyuplai utama air irigasi pada areal pertanian, juga untuk memperlancar model transportasi warga, khususnya di wilayah Nagara (Kec.Daha Selatan, Daha utara serta Daha barat). Realisasi pelaksanaan pekerjaan Normalisasi/Restorasi Sungai Tahun 2023 dari target 118.400 meter menjadi melebihi target yaitu 154.951 meter. Bertambahnya output ini dikarenakan beberapa paket usulan lokasi awal Normalisasi sungai ada yang berubah lokasi dikarenakan adanya beberapa warga tidak setuju lahannya dilalui untuk akses alat berat dan masalah ganti rugi lahan yang berdampak pada berubahnya lokasi serta lebar/panjang sungai berubah. Realisasi Keuangan Normalisasi/Restorasi Sungai sebesar Rp.17.441.506.446,- dengan presentase realisasi keuangan 98,59% dan realisasi fisik 130,87%. Capaian yang melebihi target yang telah ditentukan disini, dikarenakan adanya tambahan Anggaran pada APBD-P Tahun 2023. Melalui aspirasi dari Anggota DPRD terkait untuk penanganan banjir pada areal pertanian khususnya yang terdampak pada luapan air sungai Amandit

lama dan aspirasi ini merupakan masa bakti anggota DPRD terakhir di tahun 2023.

- c. Rehabilitasi Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing memiliki pagu anggaran Rp.472.500.000,- pada kegiatan ini telah terlaksana pekerjaan Rehabilitasi Pembangunan perkuatan tebing dengan merehab isi batu dan pemasangan kawat bronjong yang telah mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh arus sungai yang deras menggerus tebing sungai yang terdapat di 2 lokasi yang berbeda yaitu Desa Taniran selatan Kec.Angkinang dan Desa Jembatan merah Kec.Padang batung dengan realisasi panjang konstruksi 68 meter. Dimana output dari kegiatan ini sangat bermanfaat untuk melindungi tebing yang longsor pada permukiman penduduk yang berada di sekitar bantaran sungai. Realisasi anggaran pada sub kegiatan ini yaitu Rp.469.224.000,- dengan presentase realisasi keuangan 99,31% dan realisasi fisik 161,90%.
- d. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota memiliki pagu Rp.51.670.000,-. Sub kegiatan ini memiliki 2 buah sasaran yaitu Terlaksananya Bimtek kepada kelompok tani/P3A di Kab.HSS dan Terlaksananya Sidang Komisi Irigasi sebelum masa tanam pertama dan kedua. Manfaat dengan dilaksanakan kegiatan ini yaitu memberikan edukasi dan pembinaan kepada 20 orang kelompok P3A, Sehingga memahami peran serta terhadap pengelolaan saluran irigasi baik yang dilakukan secara gotong royong maupun secara pribadi untuk menjaga

umur bangunan dari jaringan irigasi. Selain itu terdapat kegiatan Sidang Komisi Irigasi yang idealnya dilaksanakan selama 2 kali masa tanam, sehingga terdapat koordinasi antara para anggota dari pemerintah dan non pemerintah terkait kesulitan dan kendala yang dihadapi untuk meningkatkan produksi hasil pertanian selama ini. Untuk realisasi Sidang komir itu sendiri hanya dapat terlaksana 1 kali dari 2 kali sidang yang ditargetkan karena kurang siapnya tim sekertariat dalam mengkoordinir jadwal sidang antar anggota komir. Realisasi anggaran sebesar Rp.34.835.000,- dengan presentase realisasi keuangan 67,42%.

- 1.2 Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa memiliki pagu Rp.2.528.000.000,-. Dokumen Perencanaan yang terealisasi yaitu 23 Dokumen Perencanaan, Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan yang sesuai kewenangan Kab.HSS. Beberapa dokumen yang dihasilkan ini merupakan data dukung untuk paket pekerjaan konstruksi yang nantinya akan dikerjakan oleh Bidang Sumber daya air itu sendiri dan pihak Balai wilayah sungai Kalimantan III. Dengan Realisasi pagu Rp.2.441.630.700,- dan realisasi keuangan 96,58%.
 - b. Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan memiliki pagu Rp. 2.149.650.000,-. Pada kegiatan ini telah dilakukan pembangunan beberapa saluran sekunder dan tersier agar air irigasi bisa sampai ke areal petak sawah, sehingga dapat meningkatkan Indeks pertanaman di areal sawah tersebut. Adapun Bendung yang dibangun saluran sekunder dan tersier ini yaitu sebanyak 9 lokasi dan merupakan usulan dari kelompok tani/p3a yang diusulkan melalui musrenbang dan Renja Bidang SDA. Kegiatan ini telah terealisasi

pembangunan saluran sekunder dan tersier sepanjang 2.478 meter dan Realisasi anggaran pada kegiatan ini yaitu Rp.2.129.872.100,- dengan presentase realisasi keuangan 99,08% serta realisasi fisik 137,68%.

- c. Sub Kegiatan Pembangunan Bendung Irigasi dengan anggaran Rp. 238.450.000,- Pada Sub kegiatan ini hanya terdapat 1 pekerjaan konstruksi yaitu pembangunan Bendung DI.Jelatan di desa Asam Kec.Sungai Raya. Dimana pembangunan bendung ini menghasilkan output 1 buah dengan outcome luas 177 Ha, sehingga menambah luasan Fungsional sawah yang dapat terairi air irigasi merupakan kewenangan Kab.HSS. Kegiatan ini merupakan salah satu yang meningkatkan realisasi target Program Pada Eselon III, yaitu dengan dibangunnya Bedung yang merupakan Daerah irigasi baru dapat meningkatkan Luas fungsional areal pertanian yang dialiri air irigasi, sehingga dampaknya akan meningkatkan produksi pertanian di desa/kecamatan tersebut. Realisasi anggaran Rp. 237.482.000,- dengan persentase realisasi keuangan 99,59% dan realisasi fisik 100%.
- d. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan memiliki pagu anggaran Rp. 2.642.751.296,- yang mana Pada Sub kegiatan ini telah dilakukan pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan yang bersumber dari Dana APBD II. Hasil dari kegiatan ini bangunan Daerah Irigasi permukaan pada bangunan bendung dan saluran yang sebelumnya mengalami rusak sedang/berat menjadi kondisi baik. Ada 11 bangunan Daerah irigasi permukaan yang dilaksanakan pekerjaan rehabilitasi jaringan, dampaknya kondisi bangunan sayap, lantai, saluran primer dan sekunder menjadi baik dengan panjang penanganan 1.667 meter dengan outcome 717 ha Luas fungsional yang direhab. Realisasi anggaran pada kegiatan ini yaitu Rp. 2.619.090.974,- dengan presentase realisasi keuangan 99,10% dan

realisasi fisik 100%.

- e. Sub Kegiatan Rehabilitasi Bendung Irigasi memiliki pagu anggaran Rp. 692.150.000,- yang mana Pada Sub kegiatan ini telah dilakukan pekerjaan Rehabilitasi Bendung Irigasi Permukaan yang bersumber dari Dana APBD II. Hasil dari kegiatan ini bangunan Irigasi permukaan dan rawa yang mengalami kerusakan telah berubah kondisi yang sebelumnya rusak sedang/berat menjadi kondisi baik. Ada 3 bangunan Daerah irigasi permukaan yang dilaksanakan pekerjaan rehabilitasi pada bangunan bendung irigasi, dampaknya kondisi bangunan utama khususnya pada sayap, lantai, jembatan pelayanan dan saluran primer menjadi lebih baik kondisinya, sehingga Bendung bisa maksimal dalam membendung air untuk masuk ke saluran primer mengairi sawah dengan outcome 112 ha. Realisasi anggaran pada kegiatan ini yaitu Rp.686.225.600,- dengan presentase realisasi keuangan 99,14% dan realisasi fisik 100%.
- f. Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan memiliki pagu anggaran Rp. 4.512.601.918,- yang mana Pada Sub kegiatan ini telah dilakukan pekerjaan Peningkatan jaringan Irigasi Permukaan yang bersumber dari Dana DAK Kementerian Pekerjaan Umum TA.2023. Kegiatan ini menghasilkan peningkatan mutu dari saluran tanah yang sudah ada menjadi saluran pasangan batu pada Daerah irigasi Asam, DI.Pantai Ulin 1 dan DI.Wasah hilir, dimana semua paket pekerjaan ini mekanismenya diatur khusus oleh pihak KPPN. Hasil dari kegiatan ini bangunan di jaringan Irigasi permukaan yang mengalami kerusakan sedang/berat menjadi kondisi baik. Ada 3 bangunan Daerah irigasi permukaan yang dilaksanakan pekerjaan peningkatan yang hasilnya pada kondisi bangunan utama khususnya pada sayap, lantai, jembatan pelayanan menjadi lebih baik kondisinya serta peningkatan bangunan saluran primer dan sekunder sudah menjadi beton/pasangan batu, sehingga Bendung bisa maksimal dalam membendung air untuk masuk ke saluran primer dan sekunder mengairi sampai ke petak sawah petani/p3a dengan panjang realisasi peningkatan saluran sepanjang 2.441 meter dan outcome 171 ha.

Realisasi anggaran pada kegiatan ini yaitu Rp.4.371.337.716,- dengan presentase realisasi keuangan 96,87% dan realisasi fisik 85,03%. Realisasi fisik memang tidak bisa mencapai target 100% dikarenakan ada perubahan lokasi pada pekerjaan peningkatan DI.Pantai ulin yaitu adanya warga pemilik lahan yang meminta ganti rugi dan akibatnya lokasi pelaksanaan berubah dan hasil output/outcome menjadi berubah.

- g. Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa memiliki pagu anggaran Rp.3.715.059.822,- yang mana Pada Sub kegiatan ini telah dilakukan pekerjaan Peningkatan jaringan Irigasi Rawa yang bersumber dari Dana DAK Kementerian Pekerjaan Umum TA.2023. Kegiatan ini menghasilkan peningkatan mutu dari yang sebelumnya pada musim kemarau masih menggunakan kayu untuk membendung air di saluran rawa, maka sekarang sudah dibangun pintu air untuk menutup beberapa saluran sekunder agar air rawa tidak keluar dan habis untuk mengairi areal pertanian di sekitar saluran tersebut. Hasil dari kegiatan ini selain membangun pintu air dengan jumlah 4 buah, dilaksanakan juga Normalisasi saluran primer dan sekunder pada DIR Bangkai sepanjang 22.401 meter. Normalisasi saluran tersebut pada saat pelaksanaan mengalami perubahan dikarenakan adanya kelompok tani/p3a meminta ganti rugi, kemudian untuk merealisasikan pekerjaan ini kami koordinasi dengan kepala desa dan warga terkait perubahan saluran yang akan di normalisasi sehingga ada perubahan di segi realisasi output saluran menjadi lebih panjang dari target yaitu 22.401 meter dan outcome 373 ha. Realisasi anggaran pada kegiatan ini yaitu Rp.3.702.313.502,- dengan presentase realisasi keuangan 99,66% dan realisasi fisik 137%.
- h. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan memiliki anggaran Rp.904.100.000,- Pada Sub kegiatan ini telah

dilakukan pekerjaan Pemeliharaan beberapa Daerah irigasi permukaan yang terdapat di 4 Kecamatan. Manfaat dari pekerjaan pemeliharaan ini yaitu untuk mempertahankan umur bangunan Bendung dan saluran irigasi dengan membersihkan rumput dan tanaman di sekitar bangunan bendung dan saluran, serta membersihkan endapan lumpur yang ada di bendung dan saluran. Hasil pekerjaan ini manfaatnya agar air irigasi bisa lebih jernih dan umur bangunan bisa lebih baik sehingga petani bisa maksimal mendapatkan air irigasi untuk mengairi sawah. Kegiatan ini telah terealisasi pemeliharaan jaringan irigasi sepanjang 6.900 meter. Realisasi anggaran pada kegiatan ini yaitu Rp.900.010.068,- dengan presentase realisasi keuangan 99,55% dan realisasi fisik 100%.

- i. Sub Kegiatan Operasional Unit Pengelola Irigasi memiliki anggaran Rp.209.196.000,-. Pada Sub kegiatan ini terdapat gaji tenaga teknis pengelola irigasi di masing-masing kecamatan dan iuran untuk BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan di Bidang Sumber Daya Air sebanyak 9 orang. Realisasi anggaran pada kegiatan ini yaitu Rp.195.449.760,- dengan presentase realisasi keuangan 93,43% dan realisasi fisik 100%.
- 2). Program Penyelenggaraan Jalan didalamnya terdiri beberapa sub kegiatan dengan penjelasan , sebagai berikut :
- a. Hasil dari pelaksanaan kegiatan dan sub-kegiatan program penyelenggaraan jalan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar berhasil melebihi target yang telah ditetapkan. Namun, terdapat beberapa sub-kegiatan yang tidak mencapai target.
 - b. Sub-kegiatan pelebaran menuju jalan standar, terjadi kegagalan dalam mencapai target karena pekerjaan tersebut sebagian dilaksanakan melewati tahun anggaran yang telah ditetapkan. Meskipun pekerjaan dilanjutkan melalui pemberian addendum waktu dan dibayarkan pada APBD 2023, namun hal ini membuat sub-kegiatan tersebut masuk dalam DPPA bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2023. Hal ini menandakan adanya

keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan yang kemungkinan disebabkan oleh berbagai faktor seperti perencanaan yang tidak tepat atau kendala teknis lainnya.

- c. Sub-kegiatan pembangunan jembatan dan penggantian jembatan, terlihat bahwa realisasi kinerja tidak mencapai target yang telah ditetapkan untuk tahun 2023. Persentase capaian pembangunan jembatan hanya mencapai 45.83%, sementara penggantian jembatan mencapai 79.20%. Penyebab dari ketidakmampuan mencapai target ini adalah keberlangsungan pekerjaan jembatan yang masih berlangsung melalui pemberian adendum waktu.
- 3). Program Penataan Bangunan Gedung melalui Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran yang mencapai Rp. 39.007.118.478,00 (Tiga puluh Sembilan Miliar Tujuh Juta Seratus DelapanBelas Ribu Empat Ratus TujuhPuluh Delapan Rupiah). Sampai pelaksanaan tahun lalu sudah terbangun 18 bangunan strategis, dan pada tahun 2023 telah terbangun 3 buah bangunan strategis yaitu Perluasan Mall Pelayanan Publik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Rehabilitasi Asrama Bukhari, Rehabilitasi Asrama Minggu Raya. Selain dari tiga bangunan tersebut adapun bangunan lainnya yang dibangun antara lain Rehabilitasi Asrama Amuk Hantarukung di Jogjakarta, Rehabilitasi Asrama Mahasiswi HSS “Putri Amandit” dan bangunan lainnya. Pada Tahun 2023 telah dilakukan konsultasi persetujuan bangunan gedung (PBG) dengan Tim Profesi Ahli (TPA) dan Tim Penilai Teknis (TPT) dengan anggaran sebesar Rp. 308.283.280,00 (Tiga Ratus

Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah). Jumlah rekomendasi persetujuan bangunan gedung (PBG) yang diterbitkan sudah melebihi target dari 100 dokumen didapat sebanyak 112 dokumen. Sedangkan sertifikat laik fungsi bangunan belum mencapai target dari 10 berkas hanya 5 berkas yang diterbitkan pada tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan kurangnya permintaan dari pengguna jasa tentang sertifikat laik fungsi bangunan. Tentunya untuk mengatasi hal tersebut harus dilakukan sosialisasi tentang pentingnya sertifikat laik fungsi bangunan guna menjamin keamanan struktur bangunan. Dari Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan didapat sebesar Rp 246.762.934 (Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu SembilanRatus Tiga Puluh Empat Rupiah).

- 4). Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase melalui Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan pada tahun 2023 didapat panjang saluran drainase yang terbangun sepanjang 14661 m dengan anggaran sebesar Rp. 2.338.500.000,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Pada sub kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan didapat panjang saluran drainase yang direhabilitasi sepanjang 14327 m dengan anggaran sebesar Rp. 955.400.000,00 (SembilanRatus Lima Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah). Pada sub kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase didapat Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara sepanjang 14364 m dengan anggaran sebesar Rp. 1.075.944.000,00 (Satu Miliar Tujuh Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).

3.6.2. Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dan capaian kinerja (%) Sasaran ke -2 “Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar air minum dan sanitasi yang aman”

Tabel 3.28

Program Kegiatan, Sub Kegiatan pada Program Pengelolaan Pendidikan yang Secara Langsung Mendukung Ketercapaian Indikator “Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar air minum dan sanitasi yang aman”

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan dan Satuan		Target Kinerja dan Pagu Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023	
		Indikator	Satuan	Output/ Outcome	Pagu Anggran (Rp.)	Outcome/ Output	Realisasi Anggaran (Rp.)
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum							
Pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota							
1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan (DAU & DAK)				18.713.526.828		18.510.781.703
2	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan				733.494.000		731.182.268
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah							
Kegiatan Pengelolaan dan Sistem Air Limbah Domestik dalam daerah kabupaten/kota							
1	Pembangunan/Pe nyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman (DAU & DAK)				18.473.489.000		18.385.928.000
2	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik				538.283.000		524.481.360

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa untuk mencapai sasaran strategis Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar air minum dan sanitasi yang aman didukung dengan pelaksanaan 2 (dua) buah program, yaitu :

a). Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

b). Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

3.6.3 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dan capaian kinerja (%) Sasaran ke -3 “Meningkatnya kepatuhan penggunaan tata ruang sesuai dengan peruntukannya” .

Tabel 3.29
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang Secara Langsung Mendukung Ketercapaian Indikator “Meningkatnya kepatuhan penggunaan tata ruang sesuai dengan peruntukannya”

Program, Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Satuan		Target Kinerja dan Pagu Anggaran Renja Tahun 2023		Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun2023	
	Indikator	Satuan	Output/ Outcame	Pagu Anggran (Rp.)	Outcame/ Output	Realisasi Anggaran (Rp.)
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	buah	1	2.859.135.500,00	1	1.820.743.984,00
	Persentase pemenuhan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	%	54		54	
	Persentase rekomendasi perijinan yang sesuai dengan tata ruang wilayah	%	100		100	
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci (RTRR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang mendapat persetujuan dari kementerian ATR	Dok	2	546.406.500,00	0	94.862.346,00
Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Dok	1	546.406.500,00	0	94.862.346,00
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peta dasar 1:5000 per Kawasan yang mendapatkan rekomendasi dari BIG	Peta	2	2.148.225.000,00	2	1.652.800.008,00
Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan	Dok	1	2.148.225.000,00	1	1.652.800.008,00

Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Penataan Ruang					
Koordinasi dan Snkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rekomendasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan	buah	50	164.504.000,00	100	73.081.630,00
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang	Dok	1	164.504.000,00	1	73.081.630,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Terlaksananya Program Penyelenggaraan Penataan Ruang pada Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi meliputi:

1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci (RRTR) Kabupaten/Kota, pemenuhan dokumen RDTR adalah Upaya yang dilakukan agar dokumen RDTR mendapatkan persetujuan dari dari Kementerian ATR/BPN. Pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci (RRTR) Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota melaksanakan pendampingan oleh Narasumber/Tenaga Ahli terkait penyusunan Persetujuan Substansi RDTR sebesar Rp. 39.650.000,00.
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Upaya yang dilakukan agar peta skala 1:5000 per Kawasan mendapatkan rekomendasi dari BIG yaitu melakukan Kerjasama swakelola dengan Pusat Kajian Penataan Ruang (PKPR) Universitas Muhammadiyah Banjarmasin untuk Pembuatan Peta Dasar Kabupaten Hulu Sungai Selatan Skala 1:5000 dengan dana sebesar Rp.891.424.000,00, serta Kerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas

Lambung Mangkurat untuk Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RTRW, RDTR Perkotaan Kandangan dan RDTR Perkotaan Padang Batung dengan dana sebesar Rp.699.854.000,00.

3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan bidang Tata ruang dan Jasa Konstruksi yaitu rapat pokja Forum Penataan Ruang (FPR) atau rapat Forum Penataan Ruang (FPR). Rapat Pokja FPR/rapat FPR dilakukan untuk membahas permohonan yang masuk dengan kasus lahan yang dimohonkan tidak sesuai dengan peruntukan di Peraturan RTRW Kabupaten. Rapat tersebut juga mengundang SKPD terkait. Rapat FPR menghasilkan Berita Acara Hasil Rapat serta Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) atau Keterangan Rencana Kota (KRK). KKPR yang diterbitkan pada tahun 2023 berjumlah 100 buah, sedangkan biayanya sebesar Rp.29.648.350,00, didalamnya termasuk biaya cetak bahan rapat, biaya makan minum rapat, serta honorarium narasumber provinsi dan kabupaten.

3.6.4 Realisasi Anggaran Belanja Dinas PUTR Tahun 2023

Realisasi anggaran yang digunakan dalam rangka mencapai target indikator kinerja sasaran strategis 1 : “Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi” Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 3.30 berikut ini.

Tabel. 3.30

Realisasi anggaran belanja program, pendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi” Dinas PUTR Tahun 2023

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	Program Penyelenggaraan Jalan	138,877,816,611	123,497,932,104	88,93%
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	4,369,844,000	4,323,807,801	98,95%
3	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	47,719,423,436	47,012,272,066	98,52%
4	Program Penataan Bangunan Gedung	40,475,630,801	39,315,401,758	97,13%
5	Program Pengembangan jasa Konstruksi	685,364,200	372,801,967	54,39%
Jumlah		232,128,079,048	214,522,215,696	92,42%

Realisasi anggaran program untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi” sangat tinggi mencapai rata-rata 92,42%, meskipun ada satu program yang penyerapannya rendah pada program pengembangan jasa konstruksi karena adanya kewenangan dalam penerbitan jasa usaha konstruksi yang tidak lagi menjadi kewenangan daerah sehingga tidak bisa dilaksanakan. sedangkan yang tidak terserap relative kecil sebesar 7,58% karena adanya efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Adapun Realisasi anggaran yang digunakan dalam rangka mencapai target indikator kinerja sasaran strategis 2 : “Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar air minum dan sanitasi yang aman” Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 3.31 berikut ini.

Tabel. 3.31

Realisasi anggaran belanja program, pendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar air minum dan sanitasi yang aman” Dinas PUTR Tahun 2023

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
1	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	19,447,020,828	19,241,963,971	98,95%
2	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	19,011,772,000	18,910,409,360	99,47%
Jumlah		38,458,792,828	38,152,373,331	99,20%

Realisasi anggaran program untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar air minum dan sanitasi yang aman” sangat tinggi mencapai rata-rata 99,20%, sedangkan yang tidak terserap relative kecil sebesar 0,80% karena adanya efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Sedangkan Realisasi anggaran yang digunakan dalam rangka mencapai target indikator kinerja sasaran strategis 3 : “Meningkatnya kepatuhan penggunaan tata ruang sesuai dengan peruntukannya” Tahun 2023, dapat dilihat pada tabel 3.32 berikut ini.

Tabel 3.32

Realisasi anggaran belanja program, pendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya kepatuhan penggunaan tata ruang sesuai dengan peruntukannya” Dinas PUTR Tahun 2023

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian (%)
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	2.859.135.500,00	1.820.743.984,00	63,68
JUMLAH		2.859.135.500,00	1.820.743.984,00	63,68

Capaian realisasi anggaran program untuk mencapai sasaran kinerja meningkatnya kepatuhan penggunaan tata ruang sesuai

dengan peruntukannya relative tidak terlalu besar karena adanya sebagian anggaran untuk pembuatan peta RDTR dan RTRW tidak terserap sehubungan dengan adanya kendala koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG).

3.7 Analisis Efektifitas dan Efisiensi

Dari pengukurun/penilaian Perubahan Pengukuran Kinerja Tahun 2023 dapat di analisis **Tingkat Efektifitas** dan **Efisiensi Kinerja** sebagai berikut:

Tabel : 3. 33 Efektifitas Kinerja

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja	Realiasi Kinerja	Capaian Kinerja (Realisasi Kinerja / Target Kinerja)*100	Ket
1	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi	Indeks Konektivitas Jalan	Indeks	3,642	3,649	100.19%	Efektif
		Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	%	71.43%	71.65%	100.31%	Efektif
		Persentase bangunan gedung yang laik fungsi	%	100%	100%	100.00%	Efektif
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar air minum dan sanitasi yang aman	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman	%	85.90%	87.44%	101.79%	Efektif
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	%	90%	97.77%	108.63%	Efektif
3	Meningkatnya kepatuhan penggunaan tata ruang sesuai dengan peruntukannya	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang	%	100%	100%	100%	Efektif
Tingkat Efektifitas Sasaran =		101,82% (Efektif)					

Tingkat efektifitas merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja, semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin efektif. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat efektifitas semua sasaran strategis melebihi nilai 100 % dengan rata-rata 101,82 % yang menunjukkan bahwa sasaran strategis efektif tercapai.

Tabel 3.34 Efisiensi

No	Sasaran	Indikator Kinerja sasaran	Target Kinerja (a)	Realiasi Kinerja (b)	Capaian Kinerja (c) = (b/a)x100	Pagu Anggaran (d)	Realisasi Anggaran(e)	Efisiensi (f) = $\frac{(dxc)-e}{(dxc)} \times 100\%$	Ket
1	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi	Indeks Konektivitas Jalan	3,642	3,649	100.19%	143,247,660,611	127,821,739,905	0,99	Efisien
		Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	71.43%	71.65%	100.31%	47,719,423,436	47,012,272,066		
		Persentase bangunan gedung yang laik fungsi	100%	100%	100.00%	40,475,630,801	39,315,401,758		
2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar air minum dan sanitasi yang aman	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman	85.90%	87.44%	101.79%	19,011,772,000	18,910,409,360	0,99	Efisien
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak	90%	97.77%	108.63%	19,447,020,828	18,910,409,360		
3	Meningkatnya kepatuhan penggunaan tata ruang sesuai dengan peruntukannya	Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang	100%	100%	100	2.859.135.500,00	1.820.743.984,00	0,99	Efisien
Tingkat Efisiensi Sasaran 1 =				0,99	(Efisien)				
Tingkat Efisiensi Sasaran 2 =				0,99	(Efisien)				
Tingkat Efisiensi Sasaran 3 =				0,99	(Efisien)				
Tingkat efisiensi Sasaran 1,2 dan 3				0,99	(Efisien)				

Efisiensi adalah nilai yang menunjukkan penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien dalam mencapai target sasaran strategis dengan nilai rata-rata 0,99.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja Dinas PUTR Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Dinas PUTR Tahun 2023 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan.. Capaian kinerja Dinas PUTR Tahun 2023 dapat dinyatakan “berhasil”, karena 6 Indikator Kinerja Sasaran Strategis target nya tercapai 100 % bahkan melebihi yang ditargetkan , dengan rincian:

- a. Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 4 indikator kinerja, yaitu :
 - 1). Indeks Konektivitas Jalan, dengan capaian kinerja 100,19% kategori “SANGAT TINGGI”.
 - 2). Persentase kinerja sistem jaringan irigasi, dengan capaian kinerja kinerja 100,31% kategori “SANGAT TINGGI”.
 - 3). Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi aman, dengan capaian 101,79% kategori ”SANGAT TINGGI”

- 4). Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak, dengan capaian kinerja 108,63% kategori “SANGAT TINGGI”.
- b. Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 2 indikator kinerja :
 - 1). Persentase bangunan gedung yang laik fungsi, dengan capaian kinerja 100% kategori “SANGAT TINGGI”
 - 2). Persentase kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan rencana tata ruang dengan capaian kinerja 100% kategori “SANGAT TINGGI”.
2. Selain itu, secara keseluruhan capaian Kinerja Dinas PUTR Tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Adapun Faktor yang menunjang tercapainya target kinerja tersebut antara lain :
 - a). Adanya program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, seperti hibah sarana sanitasi dari Balai Sarana prasarana kementerian PUPR.
 - b). Sinergitas sumber pendanaan dari APBD sumber DAU dan DAK serta tugas pembantuan, yang berkontribusi dalam meningkatkan indeks konektivitas jalan, kinerja sistem jaringan irigasi, serta akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi.

4.2 Rekomendasi

Dari analisa pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2023 untuk meningkatkan kinerja dimasa akan datang perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia sesuai kebutuhan organisasi, dengan cara berkoordinasi kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Menghindari penganggaran pekerjaan fisik di anggaran perubahan sebagai antisipasi kondisi alam dan waktu yang sempit dalam pelaksanaan pekerjaan yang dikhawatirkan tidak selesainya pekerjaan .